



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN
2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan merupakan salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja yang memegang peranan sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran;
- b. bahwa standar harga satuan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bukittinggi setiap tahunnya;
- c. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM-2024 telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak sah atau tidak berlaku untuk umum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3A dihapus.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

3. Ketentuan angka 1.9.4 dihapus, dan ketentuan angka 2, angka 3, dan angka 4 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan

Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan angka 2, angka 4.1, dan angka 4.2 Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan angka 1.1, angka 4, angka 5, dan angka 15 Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah, dan ditambahkan angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Desember 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


AL AMIN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1.9. Honorarium tim penyusun jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola
Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.4 Dihapus

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------|--|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | |
| | 1.1.1. PPKD/KPA | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta | OB | Rp780.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta | OB | Rp937.500,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta | OB | Rp1.087.500,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar | OB | Rp1.245.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar | OB | Rp1.477.500,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar | OB | Rp1.710.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar | OB | Rp1.942.500,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar | OB | Rp2.257.500,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar | OB | Rp2.565.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar | OB | Rp2.880.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar | OB | Rp3.187.500,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar | OB | Rp4.770.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar | OB | Rp5.290.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar | OB | Rp5.810.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun | OB | Rp6.330.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun | OB | Rp7.370.000,00 |
| | | | |
| | 1.1.2. PPTK | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta | OB | Rp757.500,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta | OB | Rp907.500,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta | OB | Rp1.057.500,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar | OB | Rp1.207.500,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar | OB | Rp1.432.500,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar | OB | Rp1.657.500,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar | OB | Rp1.890.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar | OB | Rp2.190.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar | OB | Rp2.490.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar | OB | Rp2.790.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar | OB | Rp3.097.500,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar | OB | Rp3.472.500,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar | OB | Rp3.847.500,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar | OB | Rp4.230.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun | OB | Rp4.605.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun | OB | Rp5.355.000,00 |
| | | | |
| | 1.1.3. PPK SKPD / PPK-Unit / PPK – Unit yang bersifat Khusus. | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta | OB | Rp300.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta | OB | Rp360.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta | OB | Rp427.500,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar | OB | Rp495.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar | OB | Rp577.500,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar | OB | Rp660.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar | OB | Rp742.500,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar | OB | Rp937.500,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar | OB | Rp1.140.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar | OB | Rp1.335.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar | OB | Rp1.530.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar | OB | Rp1.830.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar | OB | Rp2.122.500,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar | OB | Rp2.422.500,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun | OB | Rp2.715.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun | OB | Rp3.315.000,00 |
| | | | |
| | 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta | OB | Rp340.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta | OB | Rp420.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta | OB | Rp500.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar | OB | Rp570.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar | OB | Rp670.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar | OB | Rp770.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar | OB | Rp860.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar | OB | Rp1.090.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar | OB | Rp1.320.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar | OB | Rp1.550.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar | OB | Rp1.780.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar | OB | Rp2.120.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar | OB | Rp2.470.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar | OB | Rp2.810.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun | OB | Rp3.160.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|--------|---|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun | OB | Rp3.840.000,00 |
| | | | |
| 1.1.5. | Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara BLUD, dan Bendahara BOSP | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 Juta | OB | Rp260.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta | OB | Rp310.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta | OB | Rp370.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Milyar | OB | Rp430.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar | OB | Rp500.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar | OB | Rp570.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar | OB | Rp640.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar | OB | Rp810.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar | OB | Rp980.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar | OB | Rp1.150.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar | OB | Rp1.330.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar | OB | Rp1.580.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar | OB | Rp1.840.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar | OB | Rp2.090.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun | OB | Rp2.350.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 Triliun | OB | Rp2.860.000,00 |
| | | | |
| 1.2. | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA | | |
| | 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | OB | Rp510.000,00 |
| | 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa | | |
| | 1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta | OP | Rp637.500,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar | OP | Rp765.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar | OP | Rp952.500,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar | OP | Rp1.140.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar | OP | Rp1.335.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar | OP | Rp1.590.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar | OP | Rp1.837.500,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar | OP | Rp2.092.500,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar | OP | Rp2.347.500,00 |
| | j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar | OP | Rp2.685.000,00 |
| | k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar | OP | Rp3.022.500,00 |
| | l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar | OP | Rp3.367.500,00 |
| | m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun | OP | Rp3.705.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|--|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun | OP | Rp4.170.000,00 |
| | | | |
| | 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja pengadaan Barang | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 Juta s.d Rp500 Juta | OP | Rp570.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar | OP | Rp690.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar | OP | Rp855.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar | OP | Rp1.027.500,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar | OP | Rp1.200.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar | OP | Rp1.432.500,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar | OP | Rp1.657.500,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar | OP | Rp1.890.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar | OP | Rp2.115.000,00 |
| | j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar | OP | Rp2.422.500,00 |
| | k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar | OP | Rp2.730.000,00 |
| | l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar | OP | Rp3.030.000,00 |
| | m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun | OP | Rp3.337.500,00 |
| | n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun | OP | Rp3.757.500,00 |
| | | | |
| | 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi atas Rp100 Juta sd. Rp250 Juta | OP | Rp360.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 Juta sd. Rp500 Juta | OP | Rp450.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Miliar | OP | Rp540.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar | OP | Rp682.500,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar | OP | Rp817.500,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar | OP | Rp952.500,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar | OP | Rp1.132.500,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar | OP | Rp1.312.500,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar | OP | Rp1.492.500,00 |
| | j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar | OP | Rp1.672.500,00 |
| | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar | OP | Rp1.920.000,00 |
| | l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar | OP | Rp2.160.000,00 |
| | m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar | OP | Rp2.400.000,00 |
| | n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun | OP | Rp2.640.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 Triliun | OP | Rp2.970.000,00 |
| | 1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 Juta sd. Rp500 Juta | OP | Rp450.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 Juta sd. Rp1 Miliar | OP | Rp540.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 Milyar sd. Rp2,5 Milyar | OP | Rp682.500,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 Milyar sd. Rp5 Milyar | OP | Rp817.500,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 Milyar sd. Rp10 Milyar | OP | Rp952.500,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar | OP | Rp1.132.500,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar | OP | Rp1.312.500,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar | OP | Rp1.492.500,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar | OP | Rp1.672.500,00 |
| | j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar | OP | Rp1.920.000,00 |
| | k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar | OP | Rp2.160.000,00 |
| | l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar | OP | Rp2.400.000,00 |
| | m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun | OP | Rp2.640.000,00 |
| | n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 Triliun | OP | Rp2.970.000,00 |
| | 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran | | |
| | 1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar | OP | Rp3.580.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar | OP | Rp4.030.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar | OP | Rp4.490.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d. Rp1 Triliun | OP | Rp4.940.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun | OP | Rp5.560.000,00 |
| | 1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Miliar s.d Rp250 Miliar | OP | Rp3.230.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Miliar s.d Rp500 Miliar | OP | Rp3.640.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Miliar s.d Rp750 Miliar | OP | Rp4.040.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Miliar s.d Rp1 Triliun | OP | Rp4.450.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Triliun | OP | Rp5.010.000,00 |
| | 1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 Milyar sd. Rp25 Milyar | OP | Rp1.510.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------|--|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 Milyar sd. Rp50 Milyar | OP | Rp1.750.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 Milyar sd. Rp75 Milyar | OP | Rp1.990.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 Milyar sd. Rp100 Milyar | OP | Rp2.230.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 Milyar sd. Rp250 Milyar | OP | Rp2.560.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 Milyar sd. Rp500 Milyar | OP | Rp2.880.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 Milyar sd. Rp750 Milyar | OP | Rp3.200.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 Milyar sd. Rp1 Triliun | OP | Rp3.520.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 Triliun | OP | Rp3.960.000,00 |
| | | | |
| 1.3. | HONORARIUM PERANGKAT UKPBJ | | |
| | 1.3.1. Kepala | OB | Rp1.000.000,00 |
| | 1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung | OB | Rp750.000,00 |
| | | | |
| 1.4. | HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA | | |
| | 1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas | | |
| | a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya | OJ | Rp1.700.000,00 |
| | b. Kepala Daerah / Pejabat setingkat Kepala Daerah / Pejabat daerah lainnya yang disetarakan | OJ | Rp1.400.000,00 |
| | c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan | OJ | Rp1.200.000,00 |
| | d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan | OJ | Rp1.000.000,00 |
| | e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan | OJ | Rp900.000,00 |
| | 1.4.2. Honorarium Moderator | OK | Rp700.000,00 |
| | 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara | OK | Rp400.000,00 |
| | 1.4.4. Honorarium Panitia | | |
| | a. Penanggung Jawab | OK | Rp450.000,00 |
| | b. Ketua / Wakil Ketua | OK | Rp400.000,00 |
| | c. Sekretaris | OK | Rp300.000,00 |
| | d. Anggota | OK | Rp300.000,00 |
| | | | |
| 1.5. | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | |
| | 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | 1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Walikota | | |
| | a. Pengarah | OB | Rp1.500.000,00 |
| | b. Penanggung Jawab | OB | Rp1.250.000,00 |
| | c. Ketua | OB | Rp1.000.000,00 |
| | d. Wakil Ketua | OB | Rp850.000,00 |
| | e. Sekretaris | OB | Rp750.000,00 |
| | f. Anggota | OB | Rp750.000,00 |
| | 1.5.1.2. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | |
| | a. Pengarah | OB | Rp750.000,00 |
| | b. Penanggung Jawab | OB | Rp700.000,00 |
| | c. Ketua | OB | Rp650.000,00 |
| | d. Wakil Ketua | OB | Rp600.000,00 |
| | e. Sekretaris | OB | Rp500.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-------|---|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | f. Anggota | OB | Rp500.000,00 |
| | 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | 1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Walikota/Sekretaris Daerah | | |
| | a. Ketua / Wakil Ketua | OB | Rp250.000,00 |
| | b. Anggota | OB | Rp220.000,00 |
| | | | |
| 1.6. | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN | | |
| | 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli | OK | Rp1.800.000,00 |
| | 1.6.2. Honorarium Beracara | OK | Rp1.800.000,00 |
| | | | |
| 1.7. | HONORARIUM PENYULUH NON APARATUR SIPIL NEGARA | | |
| | 1.7.1. SLTA | OB | Rp2.100.000,00 |
| | 1.7.2. DI/ DII / DIII / Sarjana Terapan | OB | Rp2.400.000,00 |
| | 1.7.3. Sarjana (S1) | OB | Rp2.600.000,00 |
| | 1.7.4. Master (S2) | OB | Rp2.800.000,00 |
| | 1.7.5. Doktor (S3) | OB | Rp3.000.000,00 |
| | | | |
| 1.8. | HONORARIUM ROHANIWAN | OK | Rp400.000,00 |
| | | | |
| 1.9. | HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN /MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI /PENGELOLA WEBSITE | | |
| | 1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal | | |
| | a. Penanggung Jawab | Oter | Rp500.000,00 |
| | b. Redaktur | Oter | Rp400.000,00 |
| | c. Penyunting/Editor | Oter | Rp300.000,00 |
| | d. Desain Grafis | Oter | Rp180.000,00 |
| | e. Fotografer | Oter | Rp180.000,00 |
| | f. Sekretariat | Oter | Rp150.000,00 |
| | 1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah | | |
| | a. Penanggung Jawab | Oter | Rp400.000,00 |
| | b. Redaktur | Oter | Rp300.000,00 |
| | c. Penyunting/Editor | Oter | Rp250.000,00 |
| | d. Desain Grafis | Oter | Rp180.000,00 |
| | e. Fotografer | Oter | Rp180.000,00 |
| | f. Sekretariat | Oter | Rp150.000,00 |
| | 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelolaan Website | | |
| | a. Penanggung Jawab | OB | Rp500.000,00 |
| | b. Redaktur | OB | Rp450.000,00 |
| | c. Editor | OB | Rp400.000,00 |
| | d. Web Admin | OB | Rp350.000,00 |
| | e. Web Developer | OB | Rp300.000,00 |
| | 1.9.4. Dihapus. | | |
| | | | |
| 1.10. | HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN | | |
| | 1.10.1. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar | | |
| | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp150.000,00 |
| | b. Pengawas Ujian | OH | Rp240.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | c. Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp5.000,00 |
| | 1.10.2. Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah | | |
| | a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian | Naskah/ Pelajaran | Rp190.000,00 |
| | b. Pengawas Ujian | OH | Rp270.000,00 |
| | c. Pemeriksa Hasil Ujian | Siswa/ Mata Ujian | Rp7.500,00 |
| | 1.11. HONORARIUM PENULIS BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/DAERAH | | |
| | 1.11.1. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi/Daerah | Per Butir Soal | Rp100.000,00 |
| | 1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Daerah | | |
| | a. Telaah Materi Soal | Per Butir Soal | Rp45.000,00 |
| | b. Telaah Bahas Soal | Per Butir Soal | Rp20.000,00 |
| | 1.12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) | | |
| | 1.12.1. Honorarium Penceramah | OJP | Rp1.000.000,00 |
| | 1.12.2. Honorarium Pengajar berasal dari luar SKPD penyelenggara | OJP | Rp300.000,00 |
| | 1.12.3. Honorarium Pengajar berasal dari dalam SKPD penyelenggara | OJP | Rp200.000,00 |
| | 1.12.4. Honorarium penyusun Modul diklat | Per Modul | Rp5.000.000,00 |
| | 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat | | |
| | a. Lama diklat sampai dengan 5 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp450.000,00 |
| | 2) Ketua / Wakil Ketua | OK | Rp400.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp300.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp300.000,00 |
| | b. Lama diklat 6 sampai dengan 30 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp675.000,00 |
| | 2) Ketua / Wakil Ketua | OK | Rp600.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp450.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp450.000,00 |
| | c. Lama diklat lebih dari 30 hari: | | |
| | 1) Penanggung Jawab | OK | Rp900.000,00 |
| | 2) Ketua / Wakil Ketua | OK | Rp800.000,00 |
| | 3) Sekretaris | OK | Rp600.000,00 |
| | 4) Anggota | OK | Rp600.000,00 |
| | 1.13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | |
| | 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Pembina | OB | Rp3.500.000,00 |
| | b. Pengarah | OB | Rp3.000.000,00 |
| | c. Ketua | OB | Rp2.500.000,00 |
| | d. Wakil Ketua | OB | Rp2.000.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | e. Sekretaris | OB | Rp1.500.000,00 |
| | f. Anggota | | |
| | – Anggota perumus | OB | Rp1.300.000,00 |
| | – Anggota penyusun | OB | Rp1.200.000,00 |
| | – Anggota pembahas | OB | Rp1.100.000,00 |
| | – Anggota pengumpul dan pengolah data | OB | Rp1.000.000,00 |
| | 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Ketua | OB | Rp1.000.000,00 |
| | b. Sekretaris | OB | Rp900.000,00 |
| | c. Anggota | OB | Rp600.000,00 |

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 1.2.

TABEL 1.2

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT |
|-----|---------------------|--------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aceh | OH | Rp360.000 | Rp140.000 | Rp110.000 |
| 2. | Sumatera Utara | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 3. | Riau | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 5. | Jambi | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 6. | Sumatera Barat | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 8. | Lampung | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 9. | Bengkulu | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 10. | Bangka Belitung | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 11. | Banten | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 12. | Jawa Barat | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 13. | DKI Jakarta | OH | Rp530.000 | Rp210.000 | Rp160.000 |
| 14. | Jawa Tengah | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 15. | DI Yogyakarta | OH | Rp420.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 16. | Jawa Timur | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 17. | Bali | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp440.000 | Rp180.000 | Rp130.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | OH | Rp360.000 | Rp140.000 | Rp110.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT |
|-----|-------------------|--------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | Sulawesi Utara | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 26. | Gorontalo | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | OH | Rp410.000 | Rp160.000 | Rp120.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | OH | Rp370.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 31. | Maluku | OH | Rp380.000 | Rp150.000 | Rp110.000 |
| 32. | Maluku Utara | OH | Rp430.000 | Rp170.000 | Rp130.000 |
| 33. | Papua | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 34. | Papua Barat | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan biaya uang representasi terinci pada tabel 1.3.

TABEL 1.3

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|----|--------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pejabat Negara, Pejabat Daerah | OH | Rp250.000 | Rp125.000 |
| 2. | Pejabat Eselon I | OH | Rp200.000 | Rp100.000 |
| 3. | Pejabat Eselon II | OH | Rp150.000 | Rp75.000 |

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | TARIF HOTEL | | | |
|-----|---------------------|--------|--|--|---|---|
| | | | KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD / FORKOPIMDA | ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/ ASN GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/ASN GOLONGAN III, II, dan I/PIHAK LAIN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Aceh | OH | Rp4.420.000 | Rp3.526.000 | Rp1.294.000 | Rp556.000 |
| 2. | Sumatera Utara | OH | Rp4.960.000 | Rp1.518.000 | Rp1.100.000 | Rp530.000 |
| 3. | Riau | OH | Rp3.820.000 | Rp3.119.000 | Rp1.650.000 | Rp852.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | OH | Rp4.275.000 | Rp1.854.000 | Rp1.037.000 | Rp792.000 |
| 5. | Jambi | OH | Rp4.000.000 | Rp3.337.000 | Rp1.212.000 | Rp580.000 |
| 6. | Sumatera Barat | OH | Rp5.236.000 | Rp1.750.000 | Rp1.353.000 | Rp650.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | OH | Rp5.850.000 | Rp3.083.000 | Rp1.571.000 | Rp861.000 |
| 8. | Lampung | OH | Rp4.491.000 | Rp2.067.000 | Rp1.140.000 | Rp580.000 |
| 9. | Bengkulu | OH | Rp2.071.000 | Rp1.628.000 | Rp1.546.000 | Rp630.000 |
| 10. | Bangka Belitung | OH | Rp3.827.000 | Rp2.838.000 | Rp1.957.000 | Rp622.000 |
| 11. | Banten | OH | Rp5.725.000 | Rp2.373.000 | Rp1.000.000 | Rp718.000 |
| 12. | Jawa Barat | OH | Rp5.381.000 | Rp2.755.000 | Rp1.006.000 | Rp570.000 |
| 13. | DKI Jakarta | OH | Rp5.850.000 | Rp1.490.000 | Rp992.000 | Rp730.000 |
| 14. | Jawa Tengah | OH | Rp4.242.000 | Rp1.480.000 | Rp954.000 | Rp600.000 |
| 15. | DI Yogyakarta | OH | Rp5.017.000 | Rp2.695.000 | Rp1.384.000 | Rp845.000 |
| 16. | Jawa Timur | OH | Rp4.400.000 | Rp1.605.000 | Rp1.076.000 | Rp664.000 |
| 17. | Bali | OH | Rp4.890.000 | Rp1.946.000 | Rp990.000 | Rp910.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp3.500.000 | Rp2.648.000 | Rp1.418.000 | Rp580.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp3.000.000 | Rp1.493.000 | Rp1.355.000 | Rp550.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | OH | Rp2.654.000 | Rp1.538.000 | Rp1.125.000 | Rp538.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | OH | Rp4.901.000 | Rp3.391.000 | Rp1.160.000 | Rp659.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan | OH | Rp4.797.000 | Rp3.316.000 | Rp1.500.000 | Rp540.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | OH | Rp4.000.000 | Rp2.188.000 | Rp1.507.000 | Rp804.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | OH | Rp4.000.000 | Rp2.188.000 | Rp1.507.000 | Rp804.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | OH | Rp4.919.000 | Rp2.290.000 | Rp924.000 | Rp782.000 |
| 26. | Gorontalo | OH | Rp4.168.000 | Rp2.549.000 | Rp1.431.000 | Rp764.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | OH | Rp4.076.000 | Rp2.581.000 | Rp1.075.000 | Rp704.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | OH | Rp4.820.000 | Rp1.550.000 | Rp1.020.000 | Rp732.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | OH | Rp2.309.000 | Rp2.027.000 | Rp1.567.000 | Rp951.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OH | Rp2.475.000 | Rp2.059.000 | Rp1.297.000 | Rp786.000 |
| 31. | Maluku | OH | Rp3.467.000 | Rp3.240.000 | Rp1.048.000 | Rp667.000 |
| 32. | Maluku Utara | OH | Rp3.440.000 | Rp3.175.000 | Rp1.073.000 | Rp600.000 |
| 33. | Papua | OH | Rp3.859.000 | Rp3.318.000 | Rp2.521.000 | Rp829.000 |
| 34. | Papua Barat | OH | Rp3.872.000 | Rp3.212.000 | Rp2.056.000 | Rp718.000 |

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan

daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terperinci pada tabel 1.5 dan tabel 1.6

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULL DAY | FULL BOARD | RESIDENCE |
|-----|---------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Aceh | OP | Rp346.000 | Rp403.000 | Rp1.075.000 | Rp749.000 |
| 2. | Sumatera Utara | OP | Rp276.000 | Rp365.000 | Rp800.000 | Rp641.000 |
| 3. | Riau | OP | Rp225.000 | Rp335.000 | Rp690.000 | Rp560.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | OP | Rp230.000 | Rp360.000 | Rp790.000 | Rp590.000 |
| 5. | Jambi | OP | Rp271.000 | Rp364.000 | Rp1.008.000 | Rp635.000 |
| 6. | Sumatera Barat | OP | Rp245.000 | Rp310.000 | Rp987.000 | Rp555.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | OP | Rp268.000 | Rp384.000 | Rp860.000 | Rp652.000 |
| 8. | Lampung | OP | Rp261.000 | Rp373.000 | Rp836.000 | Rp634.000 |
| 9. | Bengkulu | OP | Rp250.000 | Rp373.000 | Rp973.000 | Rp623.000 |
| 10. | Bangka Belitung | OP | Rp305.000 | Rp400.000 | Rp925.000 | Rp705.000 |
| 11. | Banten | OP | Rp395.000 | Rp468.000 | Rp919.000 | Rp863.000 |
| 12. | Jawa Barat | OP | Rp426.000 | Rp530.000 | Rp1.110.000 | Rp956.000 |
| 13. | DKI Jakarta | OP | Rp433.000 | Rp510.000 | Rp1.216.000 | Rp943.000 |
| 14. | Jawa Tengah | OP | Rp232.000 | Rp309.000 | Rp749.000 | Rp541.000 |
| 15. | DI Yogyakarta | OP | Rp250.000 | Rp405.000 | Rp963.000 | Rp655.000 |
| 16. | Jawa Timur | OP | Rp357.000 | Rp406.000 | Rp1.784.000 | Rp763.000 |
| 17. | Bali | OP | Rp375.000 | Rp490.000 | Rp1.500.000 | Rp865.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OP | Rp368.000 | Rp530.000 | Rp1.001.000 | Rp898.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OP | Rp308.000 | Rp388.000 | Rp1.088.000 | Rp696.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | OP | Rp337.000 | Rp400.000 | Rp810.000 | Rp737.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | OP | Rp317.000 | Rp487.000 | Rp1.267.000 | Rp804.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan | OP | Rp264.000 | Rp360.000 | Rp930.000 | Rp624.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | OP | Rp274.000 | Rp365.000 | Rp863.000 | Rp639.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | OP | Rp274.000 | Rp350.000 | Rp848.000 | Rp624.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | OP | Rp273.000 | Rp350.000 | Rp870.000 | Rp623.000 |
| 26. | Gorontalo | OP | Rp215.000 | Rp393.000 | Rp1.338.000 | Rp608.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | OP | Rp264.000 | Rp382.000 | Rp856.000 | Rp646.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | OP | Rp290.000 | Rp410.000 | Rp1.574.000 | Rp700.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | OP | Rp283.000 | Rp389.000 | Rp1.013.000 | Rp672.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OP | Rp237.000 | Rp350.000 | Rp800.000 | Rp587.000 |
| 31. | Maluku | OP | Rp306.000 | Rp454.000 | Rp1.300.000 | Rp760.000 |
| 32. | Maluku Utara | OP | Rp316.000 | Rp498.000 | Rp850.000 | Rp814.000 |
| 33. | Papua | OP | Rp318.000 | Rp536.000 | Rp1.863.000 | Rp854.000 |
| 34. | Papua Barat | OP | Rp292.000 | Rp526.000 | Rp1.752.000 | Rp818.000 |

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR
SETTINGKAT ESELON II

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULL DAY | FULL BOARD | RESIDENCE |
|-----|---------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Aceh | OP | Rp300.000 | Rp330.000 | Rp772.000 | Rp630.000 |
| 2. | Sumatera Utara | OP | Rp178.000 | Rp275.000 | Rp746.000 | Rp453.000 |
| 3. | Riau | OP | Rp185.000 | Rp245.000 | Rp591.000 | Rp430.000 |
| 4. | Kepulauan Riau | OP | Rp227.000 | Rp273.000 | Rp625.000 | Rp500.000 |
| 5. | Jambi | OP | Rp215.000 | Rp301.000 | Rp840.000 | Rp516.000 |
| 6. | Sumatera Barat | OP | Rp173.000 | Rp240.000 | Rp663.000 | Rp413.000 |
| 7. | Sumatera Selatan | OP | Rp218.000 | Rp293.000 | Rp745.000 | Rp511.000 |
| 8. | Lampung | OP | Rp216.000 | Rp270.000 | Rp640.000 | Rp486.000 |
| 9. | Bengkulu | OP | Rp214.000 | Rp284.000 | Rp912.000 | Rp498.000 |
| 10. | Bangka Belitung | OP | Rp299.000 | Rp385.000 | Rp804.000 | Rp684.000 |
| 11. | Banten | OP | Rp275.000 | Rp354.000 | Rp837.000 | Rp629.000 |
| 12. | Jawa Barat | OP | Rp331.000 | Rp398.000 | Rp822.000 | Rp729.000 |
| 13. | DKI Jakarta | OP | Rp354.000 | Rp433.000 | Rp1.197.000 | Rp787.000 |
| 14. | Jawa Tengah | OP | Rp191.000 | Rp263.000 | Rp675.000 | Rp454.000 |
| 15. | DI Yogyakarta | OP | Rp210.000 | Rp310.000 | Rp750.000 | Rp520.000 |
| 16. | Jawa Timur | OP | Rp338.000 | Rp395.000 | Rp1.352.000 | Rp733.000 |
| 17. | Bali | OP | Rp330.000 | Rp441.000 | Rp1.182.000 | Rp771.000 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | OP | Rp280.000 | Rp420.000 | Rp764.000 | Rp700.000 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | OP | Rp271.000 | Rp377.000 | Rp825.000 | Rp648.000 |
| 20. | Kalimantan Barat | OP | Rp250.000 | Rp331.000 | Rp664.000 | Rp581.000 |
| 21. | Kalimantan Tengah | OP | Rp242.000 | Rp340.000 | Rp1.031.000 | Rp582.000 |
| 22. | Kalimantan Selatan | OP | Rp194.000 | Rp295.000 | Rp734.000 | Rp489.000 |
| 23. | Kalimantan Timur | OP | Rp207.000 | Rp302.000 | Rp750.000 | Rp509.000 |
| 24. | Kalimantan Utara | OP | Rp207.000 | Rp302.000 | Rp750.000 | Rp509.000 |
| 25. | Sulawesi Utara | OP | Rp185.000 | Rp270.000 | Rp737.000 | Rp455.000 |
| 26. | Gorontalo | OP | Rp175.000 | Rp250.000 | Rp1.299.000 | Rp425.000 |
| 27. | Sulawesi Barat | OP | Rp235.000 | Rp323.000 | Rp792.000 | Rp558.000 |
| 28. | Sulawesi Selatan | OP | Rp206.000 | Rp320.000 | Rp1.127.000 | Rp526.000 |
| 29. | Sulawesi Tengah | OP | Rp234.000 | Rp385.000 | Rp738.000 | Rp619.000 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | OP | Rp195.000 | Rp295.000 | Rp688.000 | Rp490.000 |
| 31. | Maluku | OP | Rp253.000 | Rp346.000 | Rp724.000 | Rp599.000 |
| 32. | Maluku Utara | OP | Rp169.000 | Rp354.000 | Rp669.000 | Rp523.000 |
| 33. | Papua | OP | Rp293.000 | Rp478.000 | Rp990.000 | Rp771.000 |
| 34. | Papua Barat | OP | Rp284.000 | Rp421.000 | Rp1.120.000 | Rp705.000 |

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan

peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7
 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DI
 DAERAH

| NO | PROVINSI | SATUAN | FULL BOARD | FULL DAY / HALFDAY DI DALAM KOTA | RESIDENCE DI DALAM KOTA |
|----|---------------------|--------|--------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Aceh | OH | Rp120.000,00 | Rp85.000,00 | Rp120.000,00 |
| 2 | Sumatera Utara | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 3 | Riau | OH | Rp130.000,00 | Rp85.000,00 | Rp130.000,00 |
| 4 | Kepulauan Riau | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 5 | Jambi | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 6 | Sumatera Barat | OH | Rp120.000,00 | Rp85.000,00 | Rp120.000,00 |
| 7 | Sumatera Selatan | OH | Rp120.000,00 | Rp85.000,00 | Rp120.000,00 |
| 8 | Lampung | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 9 | Bengkulu | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 10 | Bangka Belitung | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 11 | Banten | OH | Rp120.000,00 | Rp85.000,00 | Rp120.000,00 |
| 12 | Jawa Barat | OH | Rp150.000,00 | Rp105.000,00 | Rp150.000,00 |
| 13 | DKI Jakarta | OH | Rp180.000,00 | Rp130.000,00 | Rp180.000,00 |
| 14 | Jawa Tengah | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 15 | DI Yogyakarta | OH | Rp140.000,00 | Rp100.000,00 | Rp140.000,00 |
| 16 | Jawa Timur | OH | Rp140.000,00 | Rp100.000,00 | Rp140.000,00 |
| 17 | Bali | OH | Rp160.000,00 | Rp115.000,00 | Rp160.000,00 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | Rp150.000,00 | Rp105.000,00 | Rp150.000,00 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | Rp140.000,00 | Rp100.000,00 | Rp140.000,00 |
| 20 | Kalimantan Barat | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 21 | Kalimantan Tengah | OH | Rp120.000,00 | Rp85.000,00 | Rp120.000,00 |
| 22 | Kalimantan Selatan | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 23 | Kalimantan Timur | OH | Rp150.000,00 | Rp105.000,00 | Rp150.000,00 |
| 24 | Kalimantan Utara | OH | Rp150.000,00 | Rp105.000,00 | Rp150.000,00 |
| 25 | Sulawesi Utara | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 26 | Gorontalo | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 27 | Sulawesi Barat | OH | Rp120.000,00 | Rp85.000,00 | Rp120.000,00 |
| 28 | Sulawesi Selatan | OH | Rp150.000,00 | Rp105.000,00 | Rp150.000,00 |
| 29 | Sulawesi Tengah | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 31 | Maluku | OH | Rp120.000,00 | Rp85.000,00 | Rp120.000,00 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | FULL BOARD | FULL DAY / HALFDAY DI DALAM KOTA | RESIDENCE DI DALAM KOTA |
|----|--------------|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 32 | Maluku Utara | OH | Rp130.000,00 | Rp95.000,00 | Rp130.000,00 |
| 33 | Papua | OH | Rp200.000,00 | Rp140.000,00 | Rp200.000,00 |
| 34 | Papua Barat | OH | Rp160.000,00 | Rp115.000,00 | Rp160.000,00 |

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel 1.8, tabel 1.9, tabel 1.10 dan tabel 1.11.

TABEL 1.8
KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II | UNIT | Rp482.074.000,00 |

TABEL 1.9
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

| NO | URAIAN | SATUAN | PICK UP | MINIBUS | DOUBLE GARDAN |
|----|---|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pengadaan Kendaraan Operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat) | UNIT | Rp219.606.000,00 | Rp335.431.000,00 | Rp479.479.000,00 |

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL BUS


| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|-----------------------------|--------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Roda 4 dan/ atau Bus Kecil | UNIT | Rp360.942.000,00 |
| 2. | Roda 6 dan/ atau Bus Sedang | UNIT | Rp718.252.000,00 |
| 3. | Roda 6 dan/ atau Bus Besar | UNIT | Rp1.184.787.000,00 |

TABEL 1.11
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

| NO | URAIAN | SATUAN | OPERASIONAL | LAPANGAN |
|----|---|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kendaraan operasional kantor dan / atau lapangan roda 2 (dua) | UNIT | Rp32.219.000,00 | Rp35.600.000,00 |

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/ Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan/atau daerah.

Pelaksana perjalanan dinas meliputi, Wali Kota/Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan biaya APBD.

TUJUAN

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan dalam rangka:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3; atau
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Selain tujuan di atas, perjalanan dinas juga dapat dilaksanakan dalam rangka:

- a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan meliputi:

- a. mengikuti rapat kerja atau rapat koordinasi dinas, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya;
- b. melakukan pembinaan, asistensi, konsultasi, koordinasi dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. melakukan pemeriksaan, pengendalian, pengawasan, mengikuti/menghadiri sidang pengadilan sebagai kuasa hukum pemerintah

- dan/atau saksi, penugasan pengamanan perjalanan dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota;
- d. mengikuti promosi/pameran/lomba; dan
 - e. melakukan studi banding untuk peningkatan wawasan.

PRINSIP

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja Daerah; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

GOLONGAN

Perjalanan dinas jabatan, digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
- b. Perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

DOKUMEN

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas meliputi:

- a. persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk melakukan perjalanan dinas;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- A. Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas diberikan oleh pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- A.1. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam:
1. Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota;
 2. pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD;
 3. pada sekretariat Daerah:
 - a) pejabat eselon II dan eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - b) pejabat eselon IV dan V, ASN golongan IV, III, II, dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah asisten pada sekretariat Daerah.
 4. pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor, dan kecamatan:
 - a) kepala Perangkat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah kepala Perangkat Daerah; dan
 - b) pejabat eselon III, IV dan V, ASN golongan IV, III, II, dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah kepala Perangkat Daerah.
 5. pada Unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah yang berwenang menyetujui adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

A.2. Perjalanan dinas luar kota Bukittinggi dalam provinsi:

1. Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota;
2. pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD;
3. pada sekretariat Daerah:
 - a) pejabat eselon II dan eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - b) pejabat eselon IV, dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah asisten.
4. pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor, dan kecamatan:
 - a) kepala Perangkat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; dan
 - b) pejabat eselon III, IV, dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala Perangkat Daerah.
5. pada unit pelaksana teknis Daerah rumah sakit umum Daerah yang berwenang menyetujui adalah Direktur Rumah Sakit.

A.3. Perjalanan dinas luar kota luar provinsi:

1. Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota;
2. pimpinan dan anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD;
3. pejabat eselon II, kepala kantor, camat, direktur rumah sakit umum daerah dan kepala bagian pada sekretariat Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Wali Kota; dan
4. pejabat eselon III, IV dan V, ASN Golongan IV, III, II dan I/pihak lain, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah.

B. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas dengan ketentuan sebagai berikut:

B.1. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam:

1. Wali Kota/Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
2. pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
3. Staf Ahli Wali Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
4. pada sekretariat Daerah:
 - a) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b) pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c) pejabat eselon III ditandatangani oleh asisten; dan
 - d) pejabat eselon IV dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh kepala bagian.
5. pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor dan kecamatan:
 - a) kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;

- b) pejabat eselon III, IV dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
6. Unit pelaksana teknis Daerah rumah sakit umum Daerah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

B.2. Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi:

1. Wali Kota/Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
2. pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
3. Staf Ahli Wali Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
4. pada sekretariat Daerah:
 - a) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b) pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c) pejabat eselon III, IV dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh asisten.
5. pada badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD, kantor dan kecamatan:
 - a) kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; dan
 - b) pejabat eselon III, IV, dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
6. pada unit pelaksana teknis Daerah rumah sakit umum Daerah:
 - a) direktur rumah sakit umum Daerah ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum Daerah; dan
 - b) pejabat eselon III, IV dan V, ASN golongan IV, III, II dan I/pihak lain, ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum Daerah.

B.3. perjalanan dinas luar kota luar provinsi:

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
2. pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
3. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, eselon II, kepala kantor, camat, direktur rumah sakit umum Daerah dan kepala bagian pada sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
4. eselon III, IV, dan V, ASN golongan IV, III, II dan I, ditandatangani oleh asisten.
5. pihak lain ditandatangani oleh asisten.

Surat tugas perjalanan dinas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar;
- b. pemberi tugas;
- c. pelaksana tugas;
- d. waktu pelaksanaan tugas;
- e. Tempat Tujuan pelaksanaan tugas; dan
- f. maksud pelaksanaan tugas.

Format surat tugas sebagai berikut:

| | |
|----------------------|---------------------|
| {KOP SURAT} | |
| SURAT TUGAS | |
| NOMOR | |
| Dasar | : |
| MEMERINTAHKAN: | |
| Kepada | : 1. Nama : |
| | Pangkat/Gol : |
| | NIP : |
| | Jabatan : |
| | 2. Nama : |
| | Pangkat/Gol : |
| | NIP : |
| | Jabatan : |
| Untuk | : 1. |
| | 2. |
| | 3. |
| Bukittinggi, tanggal | |
| Pemberi Tugas, | |
| Nama | |
| NIP | |

- C. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perjalanan dinas adalah Pejabat Pembuat Komitmen

Surat perjalanan dinas merupakan surat perintah perjalanan kedinasan yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. penjelasan waktu;
- b. maksud dan tujuan perjalanan dinas;
- c. transportasi yang digunakan;
- d. sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut;
- e. pejabat yang memerintahkan pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- f. pejabat pembuat komitmen.

Format surat perjalanan dinas sebagai berikut:

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> LOGO DAERAH </div> | {KOP SURAT} | | |
| | | Lembar ke | : |
| | | Kode No. | : |
| | | Nomor | : |
| SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) | | | |
| 1 | Pejabat Pembuat Komitmen | | |
| 2 | Nama/NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | a. | |
| | | b. | |
| | | c. | |
| 4 | Maksud perjalanan dinas | | |
| 5 | Alat angkut yang dipergunakan | | |
| 6 | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan | a. | |
| | | b. | |
| 7 | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) | a. | |
| | | b. | |
| | | c. | |
| 8 | Pengikut : Nama | Tanggal Lahir | Keterangan |
| | 1. | | |
| | 2. | | |
| | 3. | | |
| | 4. | | |
| | 5. | | |
| 9 | Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun | a. | |
| | | b. | |
| 10 | Keterangan lain-lain | | |

*Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di ...

Tanggal...

Pejabat pembuat Komitmen

(.....)

NIP

| | | |
|--|--|---|
| | | I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (Pejabat Pemberi Tugas) (.....) NIP |
| II. | Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP |
| III. | Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP |
| IV. | Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP |
| V. | Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP | Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP |
| VI. | Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP | Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. |
| VII. | Catatan Lain-lain | |
| VIII. | PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. | |
| Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP | | |

- D. Dalam hal pejabat yang berwenang untuk menyetujui dan/atau menandatangani persetujuan perjalanan dinas dan surat tugas tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan surat tugas dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Wali Kota tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilaksanakan oleh Wakil Wali Kota;
 - b. dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah;
 - c. dalam hal Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan/atau menandatangani surat tugas dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk;
 - d. dalam hal ketua DPRD tidak berada di tempat atau berhalangan maka kewenangan penerbitan persetujuan dilaksanakan oleh pimpinan DPRD lainnya;
 - e. dalam hal kepala Perangkat Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan penerbitan persetujuan dan surat tugas dapat dilaksanakan oleh pejabat di lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - f. dalam hal asisten terkait tidak berada di tempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan persetujuan dan surat tugas dilaksanakan oleh asisten lainnya di sekretariat Daerah.

BIAYA PERJALANAN DINAS

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya transportasi; dan
- d. biaya penginapan.

selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf c, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batasan tertinggi;
- b. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Yang diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan pejabat eselon II;
- c. khusus Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya bahan bakar minyak, pajak dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);

- d. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) terdiri atas:
 - i) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi (PP);
 - ii) biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri;
 - iii) biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama;
 - iv) biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil (*at cost*); dan
 - v) biaya yang menggunakan transportasi darat biaya riil (*at cost*), yang menggunakan bahan bakar minyak merupakan biaya yang dibayarkan atas bahan bakar minyak kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
- e. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan batas tertinggi. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- f. untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota kepada ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- g. biaya pemeriksaan kesehatan pandemi merupakan biaya untuk pemeriksaan tes yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Biaya pemeriksaan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*). Selain pemeriksaan kesehatan pandemi sebagaimana dimaksud juga dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan akibat dari wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. biaya bagi penjemput/pengantar jenazah yang terdiri dari atas komponen biaya uang harian, biaya transportasi (dalam hal penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan sarana transportasi umum), biaya bahan bakar minyak (dalam hal penjemputan/ pengantaran jenazah menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas), biaya penginapan (dalam hal penjemputan/pengantaran jenazah diperlukan menginap), biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, biaya angkutan jenazah. Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Wali Kota, dan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat eselon II. Dalam hal suami/istri Wali Kota, suami/Istri Wakil Wali Kota, Ketua Dharma Wanita yang melaksanakan perjalanan dinas sehubungan dengan menghadiri undangan atau mengikuti pelaksanaan program dan

kegiatan Perangkat Daerah termasuk mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan eselon II.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilakukan secara biaya riil (*at cost*).

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas:

- a. paling lama 5 (lima) hari untuk 1 (satu) kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. paling lama 2 (dua) hari untuk perjalanan menuju tempat tujuan dan paling lama 2 (dua) hari untuk kembali ke daerah dalam rangka mengikuti pendidikan setara diploma/SI/S2/S3 dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pendidikan;
- c. paling lama 3 (tiga) hari dalam rangka menjemput dan mengantar jenazah; dan/atau
- d. sesuai dengan jadwal ditetapkan oleh undangan/penyelenggara perjalanan pelaksana kegiatan yang diikuti.

Dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, dengan pertimbangan aspek efisiensi biaya, kepada pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian dan tambahan biaya penginapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dinyatakan dengan surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas; dan
- b. penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi paling lama selama 2 (dua) hari, kecuali penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas tersebut adalah untuk kegiatan yang berdasarkan undangan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan telah ditentukan.

Format surat keterangan perpanjangan tugas:

| | |
|---|---------------------|
| {KOP SURAT} | |
| <u>SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS</u> | |
| NOMOR | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini, | |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan | : |
| Mengingat dan mempertimbangkan telah diterbitkannya Surat Tugas Nomor tanggal, dengan ini menerangkan pemberian perpanjangan tugas: | |
| Kepada | : 1. Nama : |
| | Pangkat/Gol : |
| | NIP : |
| | Jabatan : |
| | 2. Nama : |
| | Pangkat/Gol : |
| | NIP : |
| | Jabatan : |
| Untuk selama | |
| Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. | |
| Bukittinggi, tanggal Yang menerangkan, | |
| (.....) NIP | |

Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan aparatur sipil negara yang bukan pegawai Pemerintah Daerah yang berasal instansi vertikal untuk melakukan kegiatan bagi kepentingan Pemerintah Daerah, maka biaya perjalanan dinas aparatur sipil negara dimaksud dapat dibebankan pada APBD, dengan administrasi kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas disesuaikan dengan ketentuan dalam nota dinas atau surat perintah tugas dari instansi vertikal yang menugaskan dengan pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Prosedur pembayaran perjalanan dinas sebagai berikut:

- a. Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah bersangkutan. Pembayaran biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) perjalanan dinas dalam kota pada rekening belanja perjalanan dinas dalam kota; dan
 - 2) perjalanan dinas luar kota pada rekening belanja perjalanan dinas biasa.
- b. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui:
- 1) mekanisme langsung, yang dilakukan untuk perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.
 - 2) mekanisme uang persediaan tunai yang dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran berdasarkan ketersediaan uang pada kas bendahara pengeluaran; dan/atau
 - 3) mekanisme uang persediaan kartu kredit Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kartu kredit Pemerintah Daerah.
- c. Pemberian uang muka melalui mekanisme uang persediaan tunai, berdasarkan persetujuan uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) surat tugas atau surat keputusan pindah;
 - 2) fotokopi SPPD;
 - 3) fotokopi persetujuan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas;
 - 4) rincian perkiraan biaya perjalanan dinas; dan
 - 5) kwitansi tanda terima uang muka,
- d. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut disetor ke bendahara pengeluaran.
- e. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme uang persediaan tunai.

Perjalanan dinas dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa perjalanan dinas dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka:
 - 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2) mengikuti rapat/seminar/konferensi/sosialisasi dan sejenisnya;
 - 3) lomba/promosi/pameran yang terkait dengan program dan kegiatan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) studi banding terkait dengan tugas dan fungsi yang melekat pada SKPD untuk menunjang program Pemerintah Daerah.
- b. Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
- c. Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan;
- e. Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;

- f. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel; dan
- g. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian yang dibayar secara langsung (LS).

PEMBATALAN

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melampirkan dokumen perjalanan dinas yang dibatalkan berupa:
 - 1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan pelaksana perjalanan dinas, atau paling rendah pejabat eselon II bagi pelaksana perjalanan dinas pejabat eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format;
 - 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format; dan
 - 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- b. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - 1) biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; dan
 - 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan (*refund*).

Format surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas:

| |
|--|
| <p>{KOP SURAT}</p> <p><u>SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS</u></p> <p>Nomor</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini:</p> <p>Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan :</p> <p>SKPD :</p> <p>menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tugas Perjalanan Dinas atas nama:</p> <p>Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan :</p> <p>SKPD :</p> <p>dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu</p> <p>.....</p> <p>Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Bukittinggi, tanggal Yang membuat pernyataan,</p> <p style="text-align: right;">(.....) NIP</p> |
|--|

Format surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagai berikut:

| | |
|--|---------|
| {KOP SURAT} | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS | |
| Nomor | |
| Yang bertanda tangan dibawah ini: | |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan | : |
| SKPD | : |
| menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tugas Perjalanan Dinas atas nama: | |
| Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan | : |
| SKPD | : |
| dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak dapat dikembalikan (<i>refund</i>) (sebagian/seluruhnya)* sebesar Rp..... pada DPA SKPD | |
| Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah. | |
| Bukittinggi, tanggal Yang membuat pernyataan, | |
| (.....) NIP | |
| *coret yang tidak perlu | |

PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemberi tugas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan penggunaan biaya perjalanan dinas yang digunakannya dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. perjalanan dinas dalam kota:
 - 1) persetujuan melakukan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;

- 2) persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan dari pejabat yang berwenang dalam hal perjalanan dinas yang membutuhkan biaya penginapan;
 - 3) surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - 4) surat perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - 5) rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPD rampung;
 - 6) bukti pembelian bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas;
 - 7) bukti pembayaran biaya transportasi, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi umum;
 - 8) bukti pembayaran penginapan di hotel/tempat penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan memerlukan penginapan;
 - 9) daftar pengeluaran riil yang diketahui PA/KPA terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
 - 10) surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan; dan/atau
 - 11) kwitansi bendahara pengeluaran yang telah diparaf oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan ditandatangani oleh PA/KPA.
- b. Perjalanan dinas luar kota:
- 1) persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;
 - 2) surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - 3) surat pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - 4) persetujuan pembebanan biaya perjalanan dinas pada DPA SKPD bersangkutan dari pejabat yang berwenang;
 - 5) laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
 - 6) rincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPD rampung;
 - 7) bukti pembelian bahan bakar minyak, dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas;
 - 8) bukti pembayaran penginapan di hotel/tempat penginapan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan memerlukan penginapan;
 - 9) bukti pembayaran biaya transportasi, meliputi tiket/karcis/struk, *airport tax*, *boarding pass*, retribusi terminal/pelabuhan;
 - 10) daftar pengeluaran riil yang diketahui PA/KPA terhadap pelaksana perjalanan dinas;
 - 11) surat undangan, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan tersebut didasarkan atas undangan;
 - 12) surat keterangan perpanjangan tugas, dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas; dan/atau
 - 13) kwitansi bendahara pengeluaran yang telah diparaf oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan ditandatangani oleh PA/KPA.

Format rincian perhitungan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:

| LAMPIRAN SPT NOMOR : | | | |
|--|-----------|--|-------------|
| TANGGAL : | | | |
| RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | |
| NO | PERINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| dst | | | |
| | JUMLAH | Rp. | |
| | TERBILANG | | |
| Telah dibayarkan sejumlah Rp. | | Telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. | |
| BENDAHARA | | YANG MENERIMA | |
| NAMA/ NIP | | NAMA/ NIP | |
| PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG | | | |
| Ditetapkan sejumlah | | : | Rp. |
| Telah dibayarkan semula | | : | Rp. |
| Kurang/ lebih | | : | Rp. |
| | | | PA atau KPA |
| | | | Nama/NIP |

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas diserahkan oleh pelaksana perjalanan dinas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau pejabat yang ditunjuk untuk diteliti sebelum diserahkan kepada bendahara pengeluaran, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilakukan. Khusus pelaksanaan perjalanan dinas pada minggu terakhir bulan Desember, penyampaian dokumen pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud disampaikan pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pemberi tugas dan pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Dalam hal pemberi tugas dan/atau pelaksana perjalanan dinas yang melakukan kesalahan, berupa:

- a. melakukan pemalsuan dokumen;
- b. manipulasi harga dengan menaikkan harga yang sebenarnya (*mark up*);
- c. melakukan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih dalam waktu yang bersamaan); atau
- d. tindakan lainnya yang berakibat kerugian bagi Daerah, dikenakan sanksi administratif dan/atau tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----|---------|----------------|--------------------|-----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | JAKARTA | AMBON | Rp13.285.000,00 | Rp7.081.000,00 |
| 2 | JAKARTA | BALIK PAPAN | Rp7,412,000.00 | Rp3.797.000,00 |
| 3 | JAKARTA | BANDA ACEH | Rp7,519,000.00 | Rp4.492.000,00 |
| 4 | JAKARTA | BANDAR LAMPUNG | Rp2,407,000.00 | Rp1.583.000,00 |
| 5 | JAKARTA | BANJAR MASIN | Rp5,252,000.00 | Rp2.995.000,00 |
| 6 | JAKARTA | BATAM | Rp4.867.000,00 | Rp2.888.000,00 |
| 7 | JAKARTA | BENGKULU | Rp4.364.000,00 | Rp2.621.000,00 |
| 8 | JAKARTA | BIAK | Rp14.065.000,00 | Rp7.519.000,00 |
| 9 | JAKARTA | DENPASAR | Rp5.305.000,00 | Rp3.262.000,00 |
| 10 | JAKARTA | GORONTALO | Rp7,231,000.00 | Rp4.824.000,00 |
| 11 | JAKARTA | JAMBI | Rp4.065.000,00 | Rp2.460.000,00 |
| 12 | JAKARTA | JAYAPURA | Rp14.568.000,00 | Rp8.193.000,00 |
| 13 | JAKARTA | YOGYAKARTA | Rp4,107,000.00 | Rp2.268.000,00 |
| 14 | JAKARTA | KENDARI | Rp7.658.000,00 | Rp4.182.000,00 |
| 15 | JAKARTA | KUPANG | Rp9.413.000,00 | Rp5.081.000,00 |
| 16 | JAKARTA | MAKASAR | Rp7.444.000,00 | Rp3.829.000,00 |
| 17 | JAKARTA | MALANG | Rp4.599.000,00 | Rp2.695.000,00 |
| 18 | JAKARTA | MAMUJU | Rp7.295.000,00 | Rp4.867.000,00 |
| 19 | JAKARTA | MANADO | Rp10.824.000,00 | Rp5.102.000,00 |
| 20 | JAKARTA | MANOKWARI | Rp16,226,000.00 | Rp10.824.000,00 |
| 21 | JAKARTA | MATARAM | Rp5.316.000,00 | Rp3.230.000,00 |
| 22 | JAKARTA | MEDAN | Rp7.252.000,00 | Rp3.808.000,00 |
| 23 | JAKARTA | PADANG | Rp5.530.000,00 | Rp2.952.000,00 |
| 24 | JAKARTA | PALANGKARAYA | Rp4,984,000.00 | Rp2.984.000,00 |
| 25 | JAKARTA | PALEMBANG | Rp3,861,000.00 | Rp2.268.000,00 |
| 26 | JAKARTA | PALU | Rp9.348.000,00 | Rp5.113.000,00 |
| 27 | JAKARTA | PANGKAL PINANG | Rp3,412,000.00 | Rp2.139.000,00 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | JAKARTA | PEKANBARU | Rp5,583.000,00 | Rp3.016.000,00 |
| 29 | JAKARTA | PONTIANAK | Rp4.353.000,00 | Rp2.781.000,00 |
| 30 | JAKARTA | SEMARANG | Rp3,861,000.00 | Rp2.182.000,00 |
| 31 | JAKARTA | SOLO | Rp3.861.000,00 | Rp2.342.000,00 |
| 32 | JAKARTA | SURABAYA | Rp5.466.000,00 | Rp2.674.000,00 |
| 33 | JAKARTA | TERNATE | Rp10.001.000,00 | Rp6.664.000,00 |
| 34 | JAKARTA | TIMIKA | Rp13.830.000,00 | Rp7.487.000,00 |
| 35 | JAKARTA | TANJUNG SELOR | Rp7.424.000,00 | Rp4.057.000,00 |
| 36 | AMBON | DENPASAR | Rp8.054.000,00 | Rp4.471.000,00 |
| 37 | AMBON | JAYAPURA | Rp7.434.000,00 | Rp4.161.000,00 |
| 38 | AMBON | KENDARI | Rp4.824.000,00 | Rp2.856.000,00 |
| 39 | AMBON | MAKASAR | Rp6.022.000,00 | Rp3.455.000,00 |
| 40 | AMBON | MANOKWARI | Rp5,177,000.00 | Rp3.027.000,00 |
| 41 | AMBON | PALU | Rp6.140.000,00 | Rp3.508.000,00 |
| 42 | AMBON | SORONG | Rp3.637.000,00 | Rp2.257.000,00 |
| 43 | AMBON | SURABAYA | Rp8.803.000,00 | Rp4.845.000,00 |
| 44 | AMBON | TERNATE | Rp4.022.000,00 | Rp2.449.000,00 |
| 45 | BALIK PAPAN | BANDA ACEH | Rp12,739,000.00 | Rp6.749.000,00 |
| 46 | BALIK PAPAN | BATAM | Rp10.354.000,00 | Rp5.305.000,00 |
| 47 | BALIK PAPAN | DENPASAR | Rp10.739.000,00 | Rp5.648.000,00 |
| 48 | BALIK PAPAN | JAYAPURA | Rp19.071.000,00 | Rp10.086.000,00 |
| 49 | BALIK PAPAN | YOGYAKARTA | Rp9,669,000.00 | Rp4.749.000,00 |
| 50 | BALIK PAPAN | MAKASAR | Rp12.664.000,00 | Rp6.150.000,00 |
| 51 | BALIK PAPAN | MANADO | Rp15.702.000,00 | Rp7.295.000,00 |
| 52 | BALIK PAPAN | MEDAN | Rp12.493.000,00 | Rp6.140.000,00 |
| 53 | BALIK PAPAN | PADANG | Rp10.942.000,00 | Rp5.369.000,00 |
| 54 | BALIK PAPAN | PALEMBANG | Rp9,445,000.00 | Rp4.749.000,00 |
| 55 | BALIK PAPAN | PEKANBARU | Rp10,996,000.00 | Rp5.423.000,00 |
| 56 | BALIK PAPAN | SEMARANG | Rp9,445,000.00 | Rp4.674.000,00 |
| 57 | BALIK PAPAN | SOLO | Rp9.445.000,00 | Rp4.813.000,00 |
| 58 | BALIK PAPAN | SURABAYA | Rp10.889.000,00 | Rp5.113.000,00 |
| 59 | BALIK PAPAN | TIMIKA | Rp18.408.000,00 | Rp9.445.000,00 |
| 60 | BANDA ACEH | DENPASAR | Rp10.835.000,00 | Rp6.279.000,00 |
| 61 | BANDA ACEH | JAYAPURA | Rp19.167.000,00 | Rp10.717.000,00 |
| 62 | BANDA ACEH | YOGYAKARTA | Rp9,765,000.00 | Rp5.380.000,00 |
| 63 | BANDA ACEH | MAKASAR | Rp12.760.000,00 | Rp6.781.000,00 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|----|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | BANDA ACEH | MANADO | Rp15.798.000,00 | Rp7.926.000,00 |
| 65 | BANDA ACEH | PONTIANAK | Rp9.990.000,00 | Rp5.840.000,00 |
| 66 | BANDA ACEH | SEMARANG | Rp9,530,000.00 | Rp5.305.000,00 |
| 67 | BANDA ACEH | SOLO | Rp9.530.000,00 | Rp5.444.000,00 |
| 68 | BANDA ACEH | SURABAYA | Rp10.985.000,00 | Rp5.744.000,00 |
| 69 | BANDA ACEH | TIMIKA | Rp18.504.000,00 | Rp10.076.000,00 |
| 70 | BANDAR LAMPUNG | BALIK PAPAN | Rp8,129,000.00 | Rp4.129.000,00 |
| 71 | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH | Rp8,225,000.00 | Rp4.760.000,00 |
| 72 | BANDAR LAMPUNG | BANJAR MASIN | Rp6,193,000.00 | Rp3.412.000,00 |
| 73 | BANDAR LAMPUNG | BATAM | Rp5.840.000,00 | Rp3.316.000,00 |
| 74 | BANDAR LAMPUNG | BIAK | Rp14.119.000,00 | Rp7.487.000,00 |
| 75 | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR | Rp6.236.000,00 | Rp3.647.000,00 |
| 76 | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA | Rp14.568.000,00 | Rp8.097.000,00 |
| 77 | BANDAR LAMPUNG | YOGYAKARTA | Rp5,155,000.00 | Rp2.760.000,00 |
| 78 | BANDAR LAMPUNG | KENDARI | Rp8.354.000,00 | Rp4.482.000,00 |
| 79 | BANDAR LAMPUNG | MAKASAR | Rp8.161.000,00 | Rp4.161.000,00 |
| 80 | BANDAR LAMPUNG | MALANG | Rp5.594.000,00 | Rp3.134.000,00 |
| 81 | BANDAR LAMPUNG | MANADO | Rp11.199.000,00 | Rp5.305.000,00 |
| 82 | BANDAR LAMPUNG | MATARAM | Rp6.246.000,00 | Rp3.626.000,00 |
| 83 | BANDAR LAMPUNG | MEDAN | Rp7.979.000,00 | Rp4.150.000,00 |
| 84 | BANDAR LAMPUNG | PADANG | Rp6.439.000,00 | Rp3.380.000,00 |
| 85 | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAYA | Rp5,947,000.00 | Rp3.401.000,00 |
| 86 | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG | Rp4,931,000.00 | Rp2.760.000,00 |
| 87 | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU | Rp6,482,000.00 | Rp3.433.000,00 |
| 88 | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK | Rp5.380.000,00 | Rp3.220.000,00 |
| 89 | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG | Rp4,931,000.00 | Rp2.685.000,00 |
| 90 | BANDAR LAMPUNG | SOLO | Rp4.931.000,00 | Rp2.824.000,00 |
| 91 | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA | Rp6.386.000,00 | Rp3.123.000,00 |
| 92 | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA | Rp13.905.000,00 | Rp7.455.000,00 |
| 93 | BANDUNG | BATAM | Rp6.289.000,00 | Rp3.583.000,00 |
| 94 | BANDUNG | DENPASAR | Rp5.626.000,00 | Rp3.252.000,00 |
| 95 | BANDUNG | JAMBI | Rp5.006.000,00 | Rp2.941.000,00 |
| 96 | BANDUNG | YOGYAKARTA | Rp3,369,000.00 | Rp2.129.000,00 |
| 97 | BANDUNG | PADANG | Rp6.129.000,00 | Rp3.508.000,00 |
| 98 | BANDUNG | PALEMBANG | Rp4,385,000.00 | Rp2.631.000,00 |
| 99 | BANDUNG | PANGKAL PINANG | Rp4,599,000.00 | Rp2.738.000,00 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|-------------|----------------|--------------------|----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | BANDUNG | PEKANBARU | Rp6,525,000.00 | Rp3.701.000,00 |
| 101 | BANDUNG | SEMARANG | Rp3,027,000.00 | Rp1.957.000,00 |
| 102 | BANDUNG | SOLO | Rp3.647.000,00 | Rp2.268.000,00 |
| 103 | BANDUNG | SURABAYA | Rp4.824.000,00 | Rp2.856.000,00 |
| 104 | BANDUNG | TANJUNG PANDAN | Rp4,439,000.00 | Rp2.663.000,00 |
| 105 | BANJARMASIN | BANDA ACEH | Rp10,792,000.00 | Rp6.022.000,00 |
| 106 | BANJARMASIN | BATAM | Rp8.407.000,00 | Rp4.578.000,00 |
| 107 | BANJARMASIN | BIAK | Rp16.686.000,00 | Rp8.749.000,00 |
| 108 | BANJARMASIN | DENPASAR | Rp8.792.000,00 | Rp4.920.000,00 |
| 109 | BANJARMASIN | JAYAPURA | Rp17.135.000,00 | Rp9.359.000,00 |
| 110 | BANJARMASIN | YOGYAKARTA | Rp7,723,000.00 | Rp4.022.000,00 |
| 111 | BANJARMASIN | MEDAN | Rp10.546.000,00 | Rp5.412.000,00 |
| 112 | BANJARMASIN | PADANG | Rp9.006.000,00 | Rp4.642.000,00 |
| 113 | BANJARMASIN | PALEMBANG | Rp7,498,000.00 | Rp4.022.000,00 |
| 114 | BANJARMASIN | PEKANBARU | Rp9,049,000.00 | Rp4.696.000,00 |
| 115 | BANJARMASIN | SEMARANG | Rp7,498,000.00 | Rp3.958.000,00 |
| 116 | BANJARMASIN | SOLO | Rp7.498.000,00 | Rp4.097.000,00 |
| 117 | BANJARMASIN | SURABAYA | Rp8.942.000,00 | Rp4.385.000,00 |
| 118 | BANJARMASIN | TIMIKA | Rp16.472.000,00 | Rp8.717.000,00 |
| 119 | BATAM | BANDA ACEH | Rp10,439,000.00 | Rp5.936.000,00 |
| 120 | BATAM | DENPASAR | Rp8.450.000,00 | Rp4.824.000,00 |
| 121 | BATAM | JAYAPURA | Rp16.782.000,00 | Rp9.263.000,00 |
| 122 | BATAM | YOGYAKARTA | Rp7,370,000.00 | Rp3.936.000,00 |
| 123 | BATAM | MAKASSAR | Rp10.375.000,00 | Rp5.337.000,00 |
| 124 | BATAM | MANADO | Rp13.413.000,00 | Rp6.482.000,00 |
| 125 | BATAM | MEDAN | Rp10.193.000,00 | Rp5.316.000,00 |
| 126 | BATAM | PADANG | Rp8.653.000,00 | Rp4.546.000,00 |
| 127 | BATAM | PALEMBANG | Rp7,145,000.00 | Rp3.936.000,00 |
| 128 | BATAM | PEKANBARU | Rp8,707,000.00 | Rp4.599.000,00 |
| 129 | BATAM | PONTIANAK | Rp7.594.000,00 | Rp4.396.000,00 |
| 130 | BATAM | SEMARANG | Rp7,145,000.00 | Rp3.861.000,00 |
| 131 | BATAM | SOLO | Rp7.145.000,00 | Rp4.000.000,00 |
| 132 | BATAM | SURABAYA | Rp8.600.000,00 | Rp4.300.000,00 |
| 133 | BATAM | TIMIKA | Rp16.119.000,00 | Rp8.621.000,00 |
| 134 | BENGKULU | PALEMBANG | Rp2,899,000.00 | Rp1.893.000,00 |
| 135 | BIAK | BALIK PAPAN | Rp18,622,000.00 | Rp9.477.000,00 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|----------|--------------|--------------------|-----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136 | BIAK | BANDA ACEH | Rp18,718,000,00 | Rp10.108.000,00 |
| 137 | BIAK | BATAM | Rp16.333.000,00 | Rp8.664.000,00 |
| 138 | BIAK | DENPASAR | Rp16.729.000,00 | Rp8.995.000,00 |
| 139 | BIAK | JAYAPURA | Rp3.615.000,00 | Rp2.321.000,00 |
| 140 | BIAK | YOGYAKARTA | Rp15,648,000,00 | Rp8.108.000,00 |
| 141 | BIAK | MANADO | Rp11.734.000,00 | Rp6.353.000,00 |
| 142 | BIAK | MEDAN | Rp18.472.000,00 | Rp9.498.000,00 |
| 143 | BIAK | PADANG | Rp16.932.000,00 | Rp8.728.000,00 |
| 144 | BIAK | PALEMBANG | Rp15,424,000,00 | Rp8.108.000,00 |
| 145 | BIAK | PEKANBARU | Rp16,985,000,00 | Rp8.781.000,00 |
| 146 | BIAK | PONTIANAK | Rp15.873.000,00 | Rp8.568.000,00 |
| 147 | BIAK | SURABAYA | Rp12.782.000,00 | Rp7.081.000,00 |
| 148 | BIAK | TIMIKA | Rp5.808.000,00 | Rp3.444.000,00 |
| 149 | DENPASAR | JAYAPURA | Rp11.680.000,00 | Rp6.845.000,00 |
| 150 | DENPASAR | KUPANG | Rp5.091.000,00 | Rp2.952.000,00 |
| 151 | DENPASAR | MAKASAR | Rp4.182.000,00 | Rp2.631.000,00 |
| 152 | DENPASAR | MANADO | Rp7.851.000,00 | Rp4.278.000,00 |
| 153 | DENPASAR | MATARAM | Rp1.840.000,00 | Rp1.390.000,00 |
| 154 | DENPASAR | MEDAN | Rp10.589.000,00 | Rp5.658.000,00 |
| 155 | DENPASAR | PADANG | Rp9.049.000,00 | Rp4.888.000,00 |
| 156 | DENPASAR | PALANGKARAYA | Rp8,557,000,00 | Rp4.909.000,00 |
| 157 | DENPASAR | PALEMBANG | Rp7,541,000,00 | Rp4.278.000,00 |
| 158 | DENPASAR | PEKANBARU | Rp9,092,000,00 | Rp4.942.000,00 |
| 159 | DENPASAR | PONTIANAK | Rp7.990.000,00 | Rp4.738.000,00 |
| 160 | DENPASAR | TIMIKA | Rp10.140.000,00 | Rp6.129.000,00 |
| 161 | JAMBI | BALIK PAPAN | Rp7,733,000,00 | Rp4.407.000,00 |
| 162 | JAMBI | BANJAR MASIN | Rp7,690,000,00 | Rp4.193.000,00 |
| 163 | JAMBI | DENPASAR | Rp7.733.000,00 | Rp4.439.000,00 |
| 164 | JAMBI | YOGYAKARTA | Rp6,653,000,00 | Rp3.551.000,00 |
| 165 | JAMBI | KUPANG | Rp11.434.000,00 | Rp6.075.000,00 |
| 166 | JAMBI | MAKASSAR | Rp9.659.000,00 | Rp4.952.000,00 |
| 167 | JAMBI | MALANG | Rp7.091.000,00 | Rp3.925.000,00 |
| 168 | JAMBI | MANADO | Rp12.707.000,00 | Rp6.097.000,00 |
| 169 | JAMBI | PALANGKARAYA | Rp7,444,000,00 | Rp4.193.000,00 |
| 170 | JAMBI | PONTIANAK | Rp6.878.000,00 | Rp4.011.000,00 |
| 171 | JAMBI | SEMARANG | Rp6,428,000,00 | Rp3.476.000,00 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|------------|------------|--------------------|-----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 172 | JAMBI | SOLO | Rp6.428.000,00 | Rp3.615.000,00 |
| 173 | JAMBI | SURABAYA | Rp7.883.000,00 | Rp3.915.000,00 |
| 174 | JAYAPURA | YOGYAKARTA | Rp13,274,000.00 | Rp7.690.000,00 |
| 175 | JAYAPURA | MANADO | Rp22.109.000,00 | Rp11.263.000,00 |
| 176 | JAYAPURA | MEDAN | Rp18.932.000,00 | Rp10.097.000,00 |
| 177 | JAYAPURA | PADANG | Rp17.381.000,00 | Rp9.327.000,00 |
| 178 | JAYAPURA | PALEMBANG | Rp15,873,000.00 | Rp8.717.000,00 |
| 179 | JAYAPURA | PEKANBARU | Rp17,435,000.00 | Rp9.380.000,00 |
| 180 | JAYAPURA | PONTIANAK | Rp16.322.000,00 | Rp9.177.000,00 |
| 181 | JAYAPURA | TIMIKA | Rp3.615.000,00 | Rp2.289.000,00 |
| 182 | YOGYAKARTA | DENPASAR | Rp3.861.000,00 | Rp2.481.000,00 |
| 183 | YOGYAKARTA | MAKASSAR | Rp6.525.000,00 | Rp3.893.000,00 |
| 184 | YOGYAKARTA | MANADO | Rp10.536.000,00 | Rp5.722.000,00 |
| 185 | YOGYAKARTA | MEDAN | Rp9.519.000,00 | Rp4.770.000,00 |
| 186 | YOGYAKARTA | PADANG | Rp7.969.000,00 | Rp4.000.000,00 |
| 187 | YOGYAKARTA | PALEMBANG | Rp6,460,000.00 | Rp3.380.000,00 |
| 188 | YOGYAKARTA | PEKANBARU | Rp8,022,000.00 | Rp4.054.000,00 |
| 189 | YOGYAKARTA | PONTIANAK | Rp6.910.000,00 | Rp3.840.000,00 |
| 190 | YOGYAKARTA | TIMIKA | Rp11.894.000,00 | Rp7.038.000,00 |
| 191 | KENDARI | BANDA ACEH | Rp12,953,000.00 | Rp7.102.000,00 |
| 192 | KENDARI | BATAM | Rp10.568.000,00 | Rp5.658.000,00 |
| 193 | KENDARI | DENPASAR | Rp5.455.000,00 | Rp3.273.000,00 |
| 194 | KENDARI | YOGYAKARTA | Rp8,129,000.00 | Rp4.706.000,00 |
| 195 | KENDARI | PADANG | Rp11.167.000,00 | Rp5.722.000,00 |
| 196 | KENDARI | PALEMBANG | Rp9,659,000.00 | Rp5.102.000,00 |
| 197 | KENDARI | PEKANBARU | Rp11,220,000.00 | Rp5.776.000,00 |
| 198 | KENDARI | SEMARANG | Rp9,659,000.00 | Rp5.027.000,00 |
| 199 | KENDARI | SOLO | Rp9.659.000,00 | Rp5.166.000,00 |
| 200 | KENDARI | SURABAYA | Rp11.103.000,00 | Rp5.466.000,00 |
| 201 | KENDARI | TIMIKA | Rp18.633.000,00 | Rp9.798.000,00 |
| 202 | KUPANG | JAYAPURA | Rp14.386.000,00 | Rp8.108.000,00 |
| 203 | KUPANG | YOGYAKARTA | Rp7,348,000.00 | Rp4.182.000,00 |
| 204 | KUPANG | MAKASAR | Rp7.637.000,00 | Rp4.311.000,00 |
| 205 | KUPANG | MANADO | Rp11.648.000,00 | Rp6.140.000,00 |
| 206 | KUPANG | SURABAYA | Rp6.749.000,00 | Rp3.722.000,00 |
| 207 | MAKASSAR | BIAK | Rp8.493.000,00 | Rp4.931.000,00 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|----------|--------------|--------------------|----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 208 | MAKASSAR | JAYAPURA | Rp10.193.000,00 | Rp5.787.000,00 |
| 209 | MAKASSAR | KENDARI | Rp2.663.000,00 | Rp1.786.000,00 |
| 210 | MAKASSAR | MANADO | Rp5.327.000,00 | Rp2.909.000,00 |
| 211 | MAKASSAR | TIMIKA | Rp11.723.000,00 | Rp6.567.000,00 |
| 212 | MALANG | BALIK PAPAN | Rp10,108,000.00 | Rp5.134.000,00 |
| 213 | MALANG | BANDA ACEH | Rp10,204,000.00 | Rp5.765.000,00 |
| 214 | MALANG | BANJAR MASIN | Rp8,161,000.00 | Rp4.407.000,00 |
| 215 | MALANG | BATAM | Rp7.819.000,00 | Rp4.311.000,00 |
| 216 | MALANG | BIAK | Rp16.087.000,00 | Rp8.482.000,00 |
| 217 | MALANG | JAYAPURA | Rp16.536.000,00 | Rp9.092.000,00 |
| 218 | MALANG | KENDARI | Rp10.322.000,00 | Rp5.487.000,00 |
| 219 | MALANG | MAKASAR | Rp10.129.000,00 | Rp5.166.000,00 |
| 220 | MALANG | MANADO | Rp13.167.000,00 | Rp6.311.000,00 |
| 221 | MALANG | MEDAN | Rp9.958.000,00 | Rp5.145.000,00 |
| 222 | MALANG | PADANG | Rp8.418.000,00 | Rp4.385.000,00 |
| 223 | MALANG | PALANGKARAYA | Rp7,915,000.00 | Rp4.407.000,00 |
| 224 | MALANG | PALEMBANG | Rp6,899,000.00 | Rp3.765.000,00 |
| 225 | MALANG | PEKANBARU | Rp8,461,000.00 | Rp4.439.000,00 |
| 226 | MALANG | TIMIKA | Rp15.873.000,00 | Rp8.461.000,00 |
| 227 | MANADO | MEDAN | Rp15.552.000,00 | Rp7.316.000,00 |
| 228 | MANADO | PADANG | Rp14.012.000,00 | Rp6.546.000,00 |
| 229 | MANADO | PALEMBANG | Rp12,504,000.00 | Rp5.926.000,00 |
| 230 | MANADO | PEKANBARU | Rp14,055,000.00 | Rp6.599.000,00 |
| 231 | MANADO | PONTIANAK | Rp12.953.000,00 | Rp6.396.000,00 |
| 232 | MANADO | SEMARANG | Rp12,504,000.00 | Rp5.851.000,00 |
| 233 | MANADO | SOLO | Rp12.504.000,00 | Rp5.990.000,00 |
| 234 | MANADO | SURABAYA | Rp9.937.000,00 | Rp5.262.000,00 |
| 235 | MANADO | TIMIKA | Rp16.183.000,00 | Rp8.995.000,00 |
| 236 | MATARAM | BALIK PAPAN | Rp10,750,000.00 | Rp5.615.000,00 |
| 237 | MATARAM | BANDA ACEH | Rp10,846,000.00 | Rp6.246.000,00 |
| 238 | MATARAM | BANJAR MASIN | Rp8,803,000.00 | Rp4.888.000,00 |
| 239 | MATARAM | BATAM | Rp8.461.000,00 | Rp4.803.000,00 |
| 240 | MATARAM | BIAK | Rp11.552.000,00 | Rp6.546.000,00 |
| 241 | MATARAM | JAYAPURA | Rp13.092.000,00 | Rp7.327.000,00 |
| 242 | MATARAM | YOGYAKARTA | Rp4,417,000.00 | Rp2.781.000,00 |
| 243 | MATARAM | MAKASAR | Rp4.717.000,00 | Rp2.909.000,00 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|--------------|-------------|--------------------|----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | MATARAM | MANADO | Rp8.717.000,00 | Rp4.738.000,00 |
| 245 | MATARAM | MEDAN | Rp10.600.000,00 | Rp5.637.000,00 |
| 246 | MATARAM | PADANG | Rp9.060.000,00 | Rp4.867.000,00 |
| 247 | MATARAM | PALEMBANG | Rp7,551,000.00 | Rp4.246.000,00 |
| 248 | MATARAM | PEKANBARU | Rp9,102,000.00 | Rp4.909.000,00 |
| 249 | MATARAM | PONTIANAK | Rp8.001.000,00 | Rp4.706.000,00 |
| 250 | MATARAM | SURABAYA | Rp3.829.000,00 | Rp2.321.000,00 |
| 251 | MEDAN | BANDA ACEH | Rp3,466,000.00 | Rp2.193.000,00 |
| 252 | MEDAN | MAKASAR | Rp12.514.000,00 | Rp6.172.000,00 |
| 253 | MEDAN | PONTIANAK | Rp9.733.000,00 | Rp5.230.000,00 |
| 254 | MEDAN | SEMARANG | Rp9,284,000.00 | Rp4.696.000,00 |
| 255 | MEDAN | SOLO | Rp9.284.000,00 | Rp4.835.000,00 |
| 256 | MEDAN | SURABAYA | Rp10.739.000,00 | Rp5.134.000,00 |
| 257 | MEDAN | TIMIKA | Rp18.258.000,00 | Rp9.455.000,00 |
| 258 | PADANG | MAKASSAR | Rp10.974.000,00 | Rp5.402.000,00 |
| 259 | PADANG | PONTIANAK | Rp8.193.000,00 | Rp4.460.000,00 |
| 260 | PADANG | SEMARANG | Rp7,744,000.00 | Rp3.925.000,00 |
| 261 | PADANG | SOLO | Rp7.744.000,00 | Rp4.065.000,00 |
| 262 | PADANG | SURABAYA | Rp9.199.000,00 | Rp4.364.000,00 |
| 263 | PADANG | TIMIKA | Rp16.718.000,00 | Rp8.685.000,00 |
| 264 | PALANGKARAYA | BANDA ACEH | Rp10,546,000.00 | Rp6.022.000,00 |
| 265 | PALANGKARAYA | BATAM | Rp8.161.000,00 | Rp4.578.000,00 |
| 266 | PALANGKARAYA | YOGYAKARTA | Rp7,477,000.00 | Rp4.022.000,00 |
| 267 | PALANGKARAYA | MATARAM | Rp8.557.000,00 | Rp4.888.000,00 |
| 268 | PALANGKARAYA | MEDAN | Rp10.300.000,00 | Rp5.412.000,00 |
| 269 | PALANGKARAYA | PADANG | Rp8.760.000,00 | Rp4.642.000,00 |
| 270 | PALANGKARAYA | PALEMBANG | Rp7,252,000.00 | Rp4.022.000,00 |
| 271 | PALANGKARAYA | PEKANBARU | Rp8,803,000.00 | Rp4.696.000,00 |
| 272 | PALANGKARAYA | SEMARANG | Rp7,252,000.00 | Rp3.947.000,00 |
| 273 | PALANGKARAYA | SOLO | Rp7.252.000,00 | Rp4.086.000,00 |
| 274 | PALANGKARAYA | SURABAYA | Rp8.696.000,00 | Rp4.385.000,00 |
| 275 | PALEMBANG | BALIK PAPAN | Rp9,894,000.00 | Rp5.220.000,00 |
| 276 | PALEMBANG | MAKASAR | Rp9.466.000,00 | Rp4.781.000,00 |
| 277 | PALEMBANG | PONTIANAK | Rp6.685.000,00 | Rp3.840.000,00 |
| 278 | PALEMBANG | SEMARANG | Rp6,236,000.00 | Rp3.305.000,00 |
| 279 | PALEMBANG | SOLO | Rp6.236.000,00 | Rp3.444.000,00 |

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | |
|-----|----------------|--------------|--------------------|----------------|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 280 | PALEMBANG | SURABAYA | Rp7.690.000,00 | Rp3.744.000,00 |
| 281 | PALEMBANG | TIMIKA | Rp15.210.000,00 | Rp8.076.000,00 |
| 282 | PALU | MAKASAR | Rp4.268.000,00 | Rp2.578.000,00 |
| 283 | PALU | POSO | Rp1.957.000,00 | Rp1.423.000,00 |
| 284 | PALU | SORONG | Rp6.878.000,00 | Rp3.883.000,00 |
| 285 | PALU | SURABAYA | Rp6.878.000,00 | Rp3.883.000,00 |
| 286 | PALU | TOLI-TOLI | Rp2.941.000,00 | Rp1.915.000,00 |
| 287 | PANGKAL PINANG | BALIK PAPAN | Rp9,038,000.00 | Rp4.631.000,00 |
| 288 | PANGKAL PINANG | BANJAR MASIN | Rp7,091,000.00 | Rp3.915.000,00 |
| 289 | PANGKAL PINANG | BATAM | Rp6.739.000,00 | Rp3.818.000,00 |
| 290 | PANGKAL PINANG | YOGYAKARTA | Rp6,065,000.00 | Rp3.262.000,00 |
| 291 | PANGKAL PINANG | MAKASAR | Rp9.060.000,00 | Rp4.663.000,00 |
| 292 | PANGKAL PINANG | MANADO | Rp12.097.000,00 | Rp5.808.000,00 |
| 293 | PANGKAL PINANG | MEDAN | Rp8.888.000,00 | Rp4.653.000,00 |
| 294 | PANGKAL PINANG | PADANG | Rp7.337.000,00 | Rp3.883.000,00 |
| 295 | PANGKAL PINANG | PALEMBANG | Rp5,829,000.00 | Rp3.262.000,00 |
| 296 | PANGKAL PINANG | PEKANBARU | Rp7,391,000.00 | Rp3.936.000,00 |
| 297 | PANGKAL PINANG | PONTIANAK | Rp6.279.000,00 | Rp3.733.000,00 |
| 298 | PANGKAL PINANG | SEMARANG | Rp5,829,000.00 | Rp3.187.000,00 |
| 299 | PANGKAL PINANG | SOLO | Rp5.829.000,00 | Rp3.326.000,00 |
| 300 | PANGKAL PINANG | SURABAYA | Rp7.284.000,00 | Rp3.626.000,00 |
| 301 | PEKANBARU | PONTIANAK | Rp8.247.000,00 | Rp4.514.000,00 |
| 302 | PEKANBARU | SEMARANG | Rp7,797,000.00 | Rp3.979.000,00 |
| 303 | PEKANBARU | SOLO | Rp7.797.000,00 | Rp4.118.000,00 |
| 304 | PEKANBARU | SURABAYA | Rp9.241.000,00 | Rp4.407.000,00 |
| 305 | PEKANBARU | TIMIKA | Rp16.771.000,00 | Rp8.739.000,00 |
| 306 | PONTIANAK | MAKASAR | Rp9.915.000,00 | Rp5.241.000,00 |
| 307 | PONTIANAK | SEMARANG | Rp6,685,000.00 | Rp3.765.000,00 |
| 308 | PONTIANAK | SOLO | Rp6.685.000,00 | Rp3.904.000,00 |
| 309 | PONTIANAK | SURABAYA | Rp8.140.000,00 | Rp4.204.000,00 |
| 310 | PONTIANAK | TIMIKA | Rp15.659.000,00 | Rp8.535.000,00 |
| 311 | SEMARANG | MAKASAR | Rp9.466.000,00 | Rp4.706.000,00 |
| 312 | SOLO | MAKASAR | Rp9.466.000,00 | Rp4.845.000,00 |
| 313 | SURABAYA | DENPASAR | Rp3.198.000,00 | Rp1.979.000,00 |
| 314 | SURABAYA | JAYAPURA | Rp12.675.000,00 | Rp7.231.000,00 |
| 315 | SURABAYA | MAKASAR | Rp5.936.000,00 | Rp3.433.000,00 |
| 316 | SURABAYA | TIMIKA | Rp11.295.000,00 | Rp6.589.000,00 |

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang berlaku pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*)).
3. Dalam hal perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan pesawat, melainkan menggunakan transportasi darat, maka satuan biaya transportasi darat baik berupa tiket atau bahan bakar minyak pulang pergi dan/atau *one way* berlaku pertanggungjawaban biaya riil (*at cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 2.3

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|-----|------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Aceh | Orang / Kali | Rp123.000,00 |
| 2. | Sumatera Utara | Orang / Kali | Rp232.000,00 |
| 3. | Riau | Orang / Kali | Rp94.000,00 |
| 4. | Kepulauan Riau | Orang / Kali | Rp137.000,00 |
| 5. | Jambi | Orang / Kali | Rp147.000,00 |
| 6. | Sumatera Barat | Orang / Kali | Rp190.000,00 |
| 7. | Sumatera Selatan | Orang / Kali | Rp128.000,00 |
| 8. | Lampung | Orang / Kali | Rp167.000,00 |
| 9. | Bengkulu | Orang / Kali | Rp109.000,00 |
| 10. | Bangka Belitung | Orang / Kali | Rp90.000,00 |
| 11. | Banten | Orang / Kali | Rp446.000,00 |

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 12. | Jawa Barat | Orang / Kali | Rp166.000,00 |
| 13. | DKI Jakarta | Orang / Kali | Rp256.000,00 |
| 14. | Jawa Tengah | Orang / Kali | Rp75.000,00 |
| 15. | DI Yogyakarta | Orang / Kali | Rp118.000,00 |
| 16. | Jawa Timur | Orang / Kali | Rp194.000,00 |
| 17. | Bali | Orang / Kali | Rp159.000,00 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Orang / Kali | Rp231.000,00 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Orang / Kali | Rp108.000,00 |
| 20. | Kalimantan Barat | Orang / Kali | Rp135.000,00 |
| 21. | Kalimantan Tengah | Orang / Kali | Rp111.000,00 |
| 22. | Kalimantan Selatan | Orang / Kali | Rp150.000,00 |
| 23. | Kalimantan Timur | Orang / Kali | Rp450.000,00 |
| 24. | Kalimantan Utara | Orang / Kali | Rp102.000,00 |
| 25. | Sulawesi Utara | Orang / Kali | Rp138.000,00 |
| 26. | Gorontalo | Orang / Kali | Rp240.000,00 |
| 27. | Sulawesi Barat | Orang / Kali | Rp313.000,00 |
| 28. | Sulawesi Selatan | Orang / Kali | Rp145.000,00 |
| 29. | Sulawesi Tengah | Orang / Kali | Rp165.000,00 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | Orang / Kali | Rp171.000,00 |
| 31. | Maluku | Orang / Kali | Rp240.000,00 |
| 32. | Maluku Utara | Orang / Kali | Rp215.000,00 |
| 33. | Papua | Orang / Kali | Rp431.000,00 |
| 34. | Papua Barat | Orang / Kali | Rp182.000,00 |

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri Tabel 2.3 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara biaya riil (*at cost*)).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (pulang pergi/PP) dan/atau *one way* merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari ibu kota provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) terinci pada tabel 2.4.

TABEL 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACEH | | | |
| 1 | Banda Aceh | Kab. Aceh Barat | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 2 | Banda Aceh | Kab. Aceh Barat Daya | Orang/Kali | Rp298.000,00 |
| 3 | Banda Aceh | Kab. Aceh Besar | Orang/Kali | Rp183.000,00 |
| 4 | Banda Aceh | Kab. Aceh Jaya | Orang/Kali | Rp238.000,00 |
| 5 | Banda Aceh | Kab. Aceh Selatan | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 6 | Banda Aceh | Kab. Aceh Singkil | Orang/Kali | Rp420.000,00 |
| 7 | Banda Aceh | Kab. Aceh Tamiang | Orang/Kali | Rp315.000,00 |
| 8 | Banda Aceh | Kab. Aceh Tengah | Orang/Kali | Rp293.000,00 |
| 9 | Banda Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Orang/Kali | Rp460.000,00 |
| 10 | Banda Aceh | Kab. Aceh Timur | Orang/Kali | Rp289.000,00 |
| 11 | Banda Aceh | Kab. Aceh Utara | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 12 | Banda Aceh | Kab. Bener Meriah | Orang/Kali | Rp278.000,00 |
| 13 | Banda Aceh | Kab. Bireuen | Orang/Kali | Rp220.000,00 |
| 14 | Banda Aceh | Kab. Gayo Lues | Orang/Kali | Rp370.000,00 |
| 15 | Banda Aceh | Kab. Nagan Raya | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 16 | Banda Aceh | Kab. Pidie | Orang/Kali | Rp190.000,00 |
| 17 | Banda Aceh | Kab. Pidie Jaya | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 18 | Banda Aceh | Kota Langsa | Orang/Kali | Rp301.000,00 |
| 19 | Banda Aceh | Kota Lhokseumawe | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 20 | Banda Aceh | Kota Subulussalam | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| | MEDAN | | | |
| 21 | Medan | Kab. Asahan | Orang/Kali | Rp259.000,00 |
| 22 | Medan | Kab. Batubara | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 23 | Medan | Kab. Dairi | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 24 | Medan | Kab. Deli Serdang | Orang/Kali | Rp186.000,00 |
| 25 | Medan | Kab. Humbang Hasundutan | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 26 | Medan | Kab. Karo | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 27 | Medan | Kab. Labuhan Batu | Orang/Kali | Rp287.000,00 |
| 28 | Medan | Kab. Labuhan Batu Selatan | Orang/Kali | Rp360.000,00 |
| 29 | Medan | Kab. Labuhan Batu Utara | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 30 | Medan | Kab. Langkat | Orang/Kali | Rp186.000,00 |
| 31 | Medan | Kab. Mandailing Natal | Orang/Kali | Rp420.000,00 |
| 32 | Medan | Kab. Padang Lawas | Orang/Kali | Rp420.000,00 |
| 33 | Medan | Kab. Padang Lawas Utara | Orang/Kali | Rp420.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Medan | Kab. Pakpak Bharat | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 35 | Medan | Kab. Samosir | Orang/Kali | Rp330.000,00 |
| 36 | Medan | Kab. Serdang Bedagai | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 37 | Medan | Kab. Simalungun | Orang/Kali | Rp264.000,00 |
| 38 | Medan | Kab. Tapanuli Selatan | Orang/Kali | Rp328.000,00 |
| 39 | Medan | Kab. Tapanuli Tengah | Orang/Kali | Rp345.000,00 |
| 40 | Medan | Kab. Tapanuli Utara | Orang/Kali | Rp330.000,00 |
| 41 | Medan | Kab. Toba | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 42 | Medan | Kota Binjai | Orang/Kali | Rp180.000,00 |
| 43 | Medan | Kota Pematang Siantar | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 44 | Medan | Kota Sibolga | Orang/Kali | Rp345.000,00 |
| 45 | Medan | Kota Tanjung Balai | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 46 | Medan | Kota Tebing Tinggi | Orang/Kali | Rp203.000,00 |
| | RIAU | | | |
| 47 | Pekan Baru | Kab. Indragiri Hilir | Orang/Kali | Rp380.000,00 |
| 48 | Pekan Baru | Kab. Indragiri Hulu | Orang/Kali | Rp315.000,00 |
| 49 | Pekan Baru | Kab. Kampar | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 50 | Pekan Baru | Kab. Kuantan Singingi | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 51 | Pekan Baru | Kab. Pelalawan | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 52 | Pekan Baru | Kab. Rokan Hilir | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 53 | Pekan Baru | Kab. Rokan Hulu | Orang/Kali | Rp322.000,00 |
| 54 | Pekan Baru | Kab. Siak | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 55 | Pekan Baru | Kota Dumai | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| | KEPULAUAN RIAU | | | |
| 56 | Tanjung Pinang | Kab. Bintan | Orang/Kali | Rp185.000,00 |
| | JAMBI | | | |
| 57 | Jambi | Kab. Batanghari | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 58 | Jambi | Kab. Bungo | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 59 | Jambi | Kab. Kerinci | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 60 | Jambi | Kab. Merangin | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 61 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| 62 | Jambi | Kab. Sarolangun | Orang/Kali | Rp241.000,00 |
| 63 | Jambi | Kab. Tanjung Jabung Barat | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 64 | Jambi | Kab. Tanjung Jabung Timur | Orang/Kali | Rp190.000,00 |
| 65 | Jambi | Kab. Tebo | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 66 | Jambi | Kota Sungai Penuh | Orang/Kali | Rp308.000,00 |
| | SUMATERA BARAT | | | |
| 67 | Padang | Kab. Agam | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 68 | Padang | Kab. Dharmasraya | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 69 | Padang | Kab. Lima Puluh Kota | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 70 | Padang | Kab. Padang Pariaman | Orang/Kali | Rp205.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | Padang | Kab. Pasaman | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 72 | Padang | Kab. Pasaman Barat | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 73 | Padang | Kab. Pesisir Selatan | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 74 | Padang | Kab. Sijunjung | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 75 | Padang | Kab. Solok | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 76 | Padang | Kab. Solok Selatan | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 77 | Padang | Kab. Tanah Datar | Orang/Kali | Rp220.000,00 |
| 78 | Padang | Kota Bukit Tinggi | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 79 | Padang | Kota Padang Panjang | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 80 | Padang | Kota Pariaman | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 81 | Padang | Kota Payakumbuh | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 82 | Padang | Kota Sawahlunto | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 83 | Padang | Kota Solok | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| | SUMATERA SELATAN | | | |
| 84 | Palembang | Kab. Banyuasin | Orang/Kali | Rp203.000,00 |
| 85 | Palembang | Kab. Empat Lawang | Orang/Kali | Rp315.000,00 |
| 86 | Palembang | Kab. Lahat | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 87 | Palembang | Kab. Muara Enim | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 88 | Palembang | Kab. Musi Banyuasin | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 89 | Palembang | Kab. Musi Rawas | Orang/Kali | Rp320.000,00 |
| 90 | Palembang | Kab. Musi Rawas Utara | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 91 | Palembang | Kab. Ogan Ilir | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 92 | Palembang | Kab. Ogan Komering Ilir | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 93 | Palembang | Kab. Ogan Komering Ulu | Orang/Kali | Rp248.000,00 |
| 94 | Palembang | Kab. Ogan Komering ULu Selatan | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 95 | Palembang | Kab. Ogan Komering ULu Timur | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 96 | Palembang | Kab. Pali | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 97 | Palembang | Kota Lubuk Linggau | Orang/Kali | Rp290.000,00 |
| 98 | Palembang | Kota Pagar Alam | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 99 | Palembang | Kota Prabumulih | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| | LAMPUNG | | | |
| 100 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Barat | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 101 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Selatan | Orang/Kali | Rp234.000,00 |
| 102 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Tengah | Orang/Kali | Rp246.000,00 |
| 103 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Timur | Orang/Kali | Rp246.000,00 |
| 104 | Bandar Lampung | Kab. Lampung Utara | Orang/Kali | Rp252.000,00 |
| 105 | Bandar Lampung | Kab. Mesuji | Orang/Kali | Rp276.000,00 |
| 106 | Bandar Lampung | Kab. Pesawaran | Orang/Kali | Rp216.000,00 |
| 107 | Bandar Lampung | Kab. Pesisir Barat | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 108 | Bandar Lampung | Kab. Pringsewu | Orang/Kali | Rp222.000,00 |
| 109 | Bandar Lampung | Kab. Tanggamus | Orang/Kali | Rp240.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----------------|---------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | Bandar Lampung | Kab. Tulang Bawang | Orang/Kali | Rp252.000,00 |
| 111 | Bandar Lampung | Kab. Tulang Bawang Barat | Orang/Kali | Rp267.000,00 |
| 112 | Bandar Lampung | Kab. Way Kanan | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 113 | Bandar Lampung | Kota Metro | Orang/Kali | Rp234.000,00 |
| BENGKULU | | | | |
| 114 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan | Orang/Kali | Rp344.000,00 |
| 115 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | Orang/Kali | Rp232.000,00 |
| 116 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Utara | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 117 | Bengkulu | Kab. Kaur | Orang/Kali | Rp385.000,00 |
| 118 | Bengkulu | Kab. Kepahiang | Orang/Kali | Rp298.000,00 |
| 119 | Bengkulu | Kab. Lebong | Orang/Kali | Rp375.000,00 |
| 120 | Bengkulu | Kab. Mukomuko | Orang/Kali | Rp423.000,00 |
| 121 | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 122 | Bengkulu | Kab. Seluma | Orang/Kali | Rp282.000,00 |
| BANGKA BELITUNG | | | | |
| 123 | Pangkalpinang | Kab. Bangka | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 124 | Pangkalpinang | Kab. Bangka Barat | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 125 | Pangkalpinang | Kab. Bangka Selatan | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 126 | Pangkalpinang | Kab. Bangka Tengah | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| BANTEN | | | | |
| 127 | Serang | Kab. Lebak | Orang/Kali | Rp208.000,00 |
| 128 | Serang | Kab. Pandeglang | Orang/Kali | Rp138.000,00 |
| 129 | Serang | Kab. Serang | Orang/Kali | Rp160.000,00 |
| 130 | Serang | Kab. Tangerang | Orang/Kali | Rp254.000,00 |
| 131 | Serang | Kota Cilegon | Orang/Kali | Rp160.000,00 |
| 132 | Serang | Kota Tangerang | Orang/Kali | Rp313.000,00 |
| 133 | Serang | Kota Tangerang Selatan | Orang/Kali | Rp347.000,00 |
| JAWA BARAT | | | | |
| 134 | Bandung | Kab. Bandung | Orang/Kali | Rp183.000,00 |
| 135 | Bandung | Kab. Bandung Barat | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 136 | Bandung | Kab. Bekasi | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 137 | Bandung | Kab. Bogor | Orang/Kali | Rp185.000,00 |
| 138 | Bandung | Kab. Ciamis | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 139 | Bandung | Kab. Cianjur | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 140 | Bandung | Kab. Cirebon | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 141 | Bandung | Kab. Garut | Orang/Kali | Rp243.000,00 |
| 142 | Bandung | Kab. Indramayu | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 143 | Bandung | Kab. Karawang | Orang/Kali | Rp248.000,00 |
| 144 | Bandung | Kab. Kuningan | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 145 | Bandung | Kab. Majalengka | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 146 | Bandung | Kab. Pangandaran | Orang/Kali | Rp283.000,00 |
| 147 | Bandung | Kab. Purwakarta | Orang/Kali | Rp218.000,00 |
| 148 | Bandung | Kab. Subang | Orang/Kali | Rp208.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|---------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 149 | Bandung | Kab. Sukabumi | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 150 | Bandung | Kab. Sumedang | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 151 | Bandung | Kab. Tasikmalaya | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 152 | Bandung | Kota Banjar | Orang/Kali | Rp283.000,00 |
| 153 | Bandung | Kota Bekasi | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 154 | Bandung | Kota Bogor | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 155 | Bandung | Kota Cimahi | Orang/Kali | Rp168.000,00 |
| 156 | Bandung | Kota Cirebon | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 157 | Bandung | Kota Depok | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 158 | Bandung | Kota Sukabumi | Orang/Kali | Rp226.000,00 |
| 159 | Bandung | Kota Tasikmalaya | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| | JAWA TENGAH | | | |
| 160 | Semarang | Kab. Banjarnegara | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 161 | Semarang | Kab. Banyumas | Orang/Kali | Rp257.000,00 |
| 162 | Semarang | Kab. Batang | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 163 | Semarang | Kab. Blora | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 164 | Semarang | Kab. Boyolali | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 165 | Semarang | Kab. Brebes | Orang/Kali | Rp263.000,00 |
| 166 | Semarang | Kab. Cilacap | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 167 | Semarang | Kab. Demak | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 168 | Semarang | Kab. Grobogan | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 169 | Semarang | Kab. Jepara | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 170 | Semarang | Kab. Karanganyar | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 171 | Semarang | Kab. Kebumen | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 172 | Semarang | Kab. Kendal | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 173 | Semarang | Kab. Klaten | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 174 | Semarang | Kab. Kudus | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 175 | Semarang | Kab. Magelang | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 176 | Semarang | Kab. Pati | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 177 | Semarang | Kab. Pekalongan | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 178 | Semarang | Kab. Pemasang | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 179 | Semarang | Kab. Purbalingga | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 180 | Semarang | Kab. Purworejo | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 181 | Semarang | Kab. Rembang | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 182 | Semarang | Kab. Semarang | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 183 | Semarang | Kab. Sragen | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 184 | Semarang | Kab. Sukoharjo | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 185 | Semarang | Kab. Tegal | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| 186 | Semarang | Kab. Temanggung | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 187 | Semarang | Kab. Wonogiri | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 188 | Semarang | Kab. Wonosobo | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 189 | Semarang | Kota Magelang | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 190 | Semarang | Kota Pekalongan | Orang/Kali | Rp245.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----------------|---------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 191 | Semarang | Kota Salatiga | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 192 | Semarang | Kota Surakarta | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 193 | Semarang | Kota Tegal | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| D.I. YOGYAKARTA | | | | |
| 194 | Yogyakarta | Kab. Bantul | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 195 | Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 196 | Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 197 | Yogyakarta | Kab. Sleman | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| JAWA TIMUR | | | | |
| 198 | Surabaya | Kab. Bangkalan | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 199 | Surabaya | Kab. Banyuwangi | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 200 | Surabaya | Kab. Blitar | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 201 | Surabaya | Kab. Bojonegoro | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 202 | Surabaya | Kab. Bondowoso | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 203 | Surabaya | Kab. Gresik | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 204 | Surabaya | Kab. Jember | Orang/Kali | Rp261.000,00 |
| 205 | Surabaya | Kab. Jombang | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 206 | Surabaya | Kab. Kediri | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 207 | Surabaya | Kab. Lamongan | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 208 | Surabaya | Kab. Lumajang | Orang/Kali | Rp261.000,00 |
| 209 | Surabaya | Kab. Madiun | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 210 | Surabaya | Kab. Magetan | Orang/Kali | Rp253.000,00 |
| 211 | Surabaya | Kab. Malang | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 212 | Surabaya | Kab. Mojokerto | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 213 | Surabaya | Kab. Nganjuk | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 214 | Surabaya | Kab. Ngawi | Orang/Kali | Rp253.000,00 |
| 215 | Surabaya | Kab. Pacitan | Orang/Kali | Rp285.000,00 |
| 216 | Surabaya | Kab. Pamekasan | Orang/Kali | Rp243.000,00 |
| 217 | Surabaya | Kab. Pasuruan | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 218 | Surabaya | Kab. Ponorogo | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 219 | Surabaya | Kab. Probolinggo | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 220 | Surabaya | Kab. Sampang | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 221 | Surabaya | Kab. Sidoarjo | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 222 | Surabaya | Kab. Situbondo | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 223 | Surabaya | Kab. Sumenep | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 224 | Surabaya | Kab. Trenggalek | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 225 | Surabaya | Kab. Tuban | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 226 | Surabaya | Kab. Tulungagung | Orang/Kali | Rp245.000,00 |
| 227 | Surabaya | Kota Batu | Orang/Kali | Rp242.000,00 |
| 228 | Surabaya | Kota Blitar | Orang/Kali | Rp255.000,00 |
| 229 | Surabaya | Kota Bojonegoro | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 230 | Surabaya | Kota Kediri | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 231 | Surabaya | Kota Madiun | Orang/Kali | Rp245.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 232 | Surabaya | Kota Malang | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| 233 | Surabaya | Kota Mojokerto | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 234 | Surabaya | Kota Probolinggo | Orang/Kali | Rp228.000,00 |
| BALI | | | | |
| 235 | Denpasar | Kab. Badung | Orang/Kali | Rp188.000,00 |
| 236 | Denpasar | Kab. Bangli | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 237 | Denpasar | Kab. Buleleng | Orang/Kali | Rp265.000,00 |
| 238 | Denpasar | Kab. Gianyar | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 239 | Denpasar | Kab. Jembrana | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 240 | Denpasar | Kab. Karangasem | Orang/Kali | Rp263.000,00 |
| 241 | Denpasar | Kab. Tabanan | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| NUSA TENGGARA BARAT | | | | |
| 242 | Mataram | Kab. Lombok Barat | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 243 | Mataram | Kab. Lombok Tengah | Orang/Kali | Rp450.000,00 |
| 244 | Mataram | Kab. Lombok Timur | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | | | | |
| 245 | Kupang | Kab. Belu | Orang/Kali | Rp325.000,00 |
| 246 | Kupang | Kab. Kupang | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 247 | Kupang | Kab. Timor Tengah Selatan | Orang/Kali | Rp218.000,00 |
| 248 | Kupang | Kab. Timor Tengah Utara | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| KALIMANTAN BARAT | | | | |
| 249 | Pontianak | Kab. Bengkayang | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 250 | Pontianak | Kab. Kapuas Hulu | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 251 | Pontianak | Kab. Kayong Utara | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 252 | Pontianak | Kab. Ketapang | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 253 | Pontianak | Kab. Kubu Raya | Orang/Kali | Rp185.000,00 |
| 254 | Pontianak | Kab. Landak | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 255 | Pontianak | Kab. Melawi | Orang/Kali | Rp430.000,00 |
| 256 | Pontianak | Kab. Mempawah | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 257 | Pontianak | Kab. Sambas | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 258 | Pontianak | Kab. Sanggau | Orang/Kali | Rp303.000,00 |
| 259 | Pontianak | Kab. Sekadau | Orang/Kali | Rp343.000,00 |
| 260 | Pontianak | Kab. Sintang | Orang/Kali | Rp392.000,00 |
| 261 | Pontianak | Kota Singkawang | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| KALIMANTAN TENGAH | | | | |
| 262 | Palangkaraya | Kab. Barito Selatan | Orang/Kali | Rp290.000,00 |
| 263 | Palangkaraya | Kab. Barito Timur | Orang/Kali | Rp333.000,00 |
| 264 | Palangkaraya | Kab. Barito Utara | Orang/Kali | Rp425.000,00 |
| 265 | Palangkaraya | Kab. Gunung Mas | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 266 | Palangkaraya | Kab. Kapuas | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 267 | Palangkaraya | Kab. Katingan | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 268 | Palangkaraya | Kab. Kotawaringin Barat | Orang/Kali | Rp425.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 269 | Palangkaraya | Kab. Kotawaringin Timur | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 270 | Palangkaraya | Kab. Lamandau | Orang/Kali | Rp525.000,00 |
| 271 | Palangkaraya | Kab. Murung Raya | Orang/Kali | Rp448.000,00 |
| 272 | Palangkaraya | Kab. Pulau Pisau | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 273 | Palangkaraya | Kab. Seruyan | Orang/Kali | Rp328.000,00 |
| 274 | Palangkaraya | Kab. Sukamara | Orang/Kali | Rp525.000,00 |
| KALIMANTAN SELATAN | | | | |
| 275 | Banjarmasin | Kab. Balangan | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 276 | Banjarmasin | Kab. Banjar | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| 277 | Banjarmasin | Kab. Barito Kuala | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 278 | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 279 | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Tengah | Orang/Kali | Rp212.000,00 |
| 280 | Banjarmasin | Kab. Hulu Sungai Utara | Orang/Kali | Rp218.000,00 |
| 281 | Banjarmasin | Kab. Kota Baru | Orang/Kali | Rp290.000,00 |
| 282 | Banjarmasin | Kab. Tabalong | Orang/Kali | Rp234.000,00 |
| 283 | Banjarmasin | Kab. Tanah Bumbu | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 284 | Banjarmasin | Kab. Tanah Laut | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 285 | Banjarmasin | Kab. Tapin | Orang/Kali | Rp189.000,00 |
| 286 | Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| KALIMANTAN TIMUR | | | | |
| 287 | Samarinda | Kab. Kutai Barat | Orang/Kali | Rp1.500.000,00 |
| 288 | Samarinda | Kab. Kutai Kartanegara | Orang/Kali | Rp500.000,00 |
| 289 | Samarinda | Kab. Kutai Timur | Orang/Kali | Rp1.350.000,00 |
| 290 | Samarinda | Kab. Paser | Orang/Kali | Rp1.650.000,00 |
| 291 | Samarinda | Kab. Penajam Paser Utara | Orang/Kali | Rp650.000,00 |
| 292 | Samarinda | Kota Balikpapan | Orang/Kali | Rp550.000,00 |
| 293 | Samarinda | Kota Bontang | Orang/Kali | Rp600.000,00 |
| SULAWESI UTARA | | | | |
| 294 | Manado | Kab. Bolaang Mongondow | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 295 | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Orang/Kali | Rp275.000,00 |
| 296 | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 297 | Manado | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 298 | Manado | Kab. Minahasa | Orang/Kali | Rp180.000,00 |
| 299 | Manado | Kab. Minahasa Selatan | Orang/Kali | Rp180.000,00 |
| 300 | Manado | Kab. Minahasa Tenggara | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 301 | Manado | Kab. Minahasa Utara | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 302 | Manado | Kota Bitung | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 303 | Manado | Kota Kotamobagu | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 304 | Manado | Kota Tomohon | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| GORONTALO | | | | |
| 305 | Gorontalo | Kab. Boalemo | Orang/Kali | Rp400.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|------------------|---------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 306 | Gorontalo | Kab. Gorontalo | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 307 | Gorontalo | Kab. Gorontalo Utara | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 308 | Gorontalo | Kab. Pahuwato | Orang/Kali | Rp650.000,00 |
| SULAWESI BARAT | | | | |
| 309 | Mamuju | Kab. Majene | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 310 | Mamuju | Kab. Mamasa | Orang/Kali | Rp359.000,00 |
| 311 | Mamuju | Kab. Mamuju | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 312 | Mamuju | Kab. Pasangkayu | Orang/Kali | Rp270.000,00 |
| 313 | Mamuju | Kab. Polewali Mandar | Orang/Kali | Rp260.000,00 |
| SULAWESI SELATAN | | | | |
| 314 | Makasar | Kab. Bantaeng | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 315 | Makasar | Kab. Barru | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 316 | Makasar | Kab. Bone | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 317 | Makasar | Kab. Bulukumba | Orang/Kali | Rp240.000,00 |
| 318 | Makasar | Kab. Enrekang | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 319 | Makasar | Kab. Gowa | Orang/Kali | Rp175.000,00 |
| 320 | Makasar | Kab. Jeneponto | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 321 | Makasar | Kab. Luwu | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 322 | Makasar | Kab. Luwu Timur | Orang/Kali | Rp375.000,00 |
| 323 | Makasar | Kab. Luwu Utara | Orang/Kali | Rp365.000,00 |
| 324 | Makasar | Kab. Maros | Orang/Kali | Rp170.000,00 |
| 325 | Makasar | Kab. Pinrang | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 326 | Makasar | Kab. Sidenreng Rappang | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 327 | Makasar | Kab. Sinjai | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 328 | Makasar | Kab. Soppeng | Orang/Kali | Rp235.000,00 |
| 329 | Makasar | Kab. Takalar | Orang/Kali | Rp190.000,00 |
| 330 | Makasar | Kab. Tanatoraja | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 331 | Makasar | Kab. Toraja Utara | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 332 | Makasar | Kab. Wajo | Orang/Kali | Rp230.000,00 |
| 333 | Makasar | Kota Palopo | Orang/Kali | Rp350.000,00 |
| 334 | Makasar | Kota Pare-Pare | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| SULAWESI TENGAH | | | | |
| 335 | Palu | Kab. Luwuk | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 336 | Palu | Kab. Buol | Orang/Kali | Rp472.000,00 |
| 337 | Palu | Kab. Donggala | Orang/Kali | Rp130.000,00 |
| 338 | Palu | Kab. Morowali | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 339 | Palu | Kab. Morowali Utara | Orang/Kali | Rp400.000,00 |
| 340 | Palu | Kab. Parigi Moutong | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 341 | Palu | Kab. Poso | Orang/Kali | Rp280.000,00 |
| 342 | Palu | Kab. Sigi | Orang/Kali | Rp219.000,00 |
| 343 | Palu | Kab. Tojouna-Una | Orang/Kali | Rp350.000,00 |

| NO | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/ KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-------------------|---------------------|---------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 344 | Palu | Kab. Toli-Toli | Orang/Kali | Rp412.000,00 |
| SULAWESI TENGGARA | | | | |
| 345 | Kendari | Kab. Bombana | Orang/Kali | Rp355.000,00 |
| 346 | Kendari | Kab. Kolaka | Orang/Kali | Rp370.000,00 |
| 347 | Kendari | Kab. Kolaka Timur | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 348 | Kendari | Kab. Kolaka Utara | Orang/Kali | Rp425.000,00 |
| 349 | Kendari | Kab. Konawe | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| 350 | Kendari | Kab. Konawe Selatan | Orang/Kali | Rp305.000,00 |
| 351 | Kendari | Kab. Konawe Utara | Orang/Kali | Rp300.000,00 |
| MALUKU UTARA | | | | |
| 352 | Sofifi | Kab. Halmahera Barat | Orang/Kali | Rp850.000,00 |
| 353 | Sofifi | Kab. Halmahera Tengah | Orang/Kali | Rp1.000.000,00 |
| 354 | Sofifi | Kab. Halmahera Timur | Orang/Kali | Rp1.250.000,00 |
| 355 | Sofifi | Kab. Halmahera Utara | Orang/Kali | Rp900.000,00 |
| PAPUA | | | | |
| 356 | Jayapura | Kab. Jayapura | Orang/Kali | Rp600.000,00 |
| 357 | Jayapura | Kab. Keerom | Orang/Kali | Rp900.000,00 |
| 358 | Jayapura | Kab. Sarmi | Orang/Kali | Rp2.700.000,00 |
| 359 | Jayapura | Merauke | Orang/Kali | Rp1.134.000,00 |
| PAPUA BARAT | | | | |
| 360 | Manokwari | Kab. Teluk Bintuni | Orang/Kali | Rp900.000,00 |
| 361 | Manokwari | Kab. Manokwari Selatan | Orang/Kali | Rp750.000,00 |
| 362 | Manokwari | Kab. Pegunungan Arfak | Orang/Kali | Rp2.650.000,00 |
| 363 | Manokwari | Kota Sorong | Orang/Kali | Rp1.000.000,00 |

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

| NO | IBU KOTA PROVINSI | KABUPATEN/KOTA TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|----|----------------------|-----------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jakarta | Kota Bekasi | Orang/Kali | Rp284.000,00 |
| 2. | Jakarta | Kab. Bekasi | Orang/Kali | Rp 284.000,00 |
| 3. | Jakarta | Kab. Bogor | Orang/Kali | Rp 300.000,00 |
| 4. | Jakarta | Kota. Bogor | Orang/Kali | Rp 300.000,00 |
| 5. | Jakarta | Kota. Depok | Orang/Kali | Rp 275.000,00 |
| 6. | Jakarta | Kota. Tangerang | Orang/Kali | Rp 286.000,00 |
| 7. | Jakarta | Kab.Tangerang Selatan | Orang/Kali | Rp 286.000,00 |
| 8. | Jakarta | Kab. Tangerang | Orang/Kali | Rp 310.000,00 |
| 9. | Jakarta | Kepulauan Seribu | Orang/Kali | Rp 428.000,00 |

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan m²/tahun dimaksudkan adalah untuk perencanaan dalam pelaksanaan hanya dibatasi dengan besaran anggaran yang tersedia.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri terinci pada tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

| NO | URAIAN | SATUAN | GEDUNG BERTINGKAT | GEDUNG TIDAK BERTINGKAT | HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR |
|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pemeliharaan gedung atau bangunan kantor | m ² /tahun | Rp182.000,00 | Rp124.000,00 | Rp10.000,00 |

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci pada tabel 2.8, tabel 2.9, dan tabel 2.10.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|--|------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Wali Kota / Wakil Wali Kota / Ketua DPRD | Unit/Tahun | Rp41.900.000,00 |
| 2 | Anggota DPRD | Unit/Tahun | Rp41.000.000,00 |
| 3 | Pejabat Eselon I | Unit/Tahun | Rp40.000.000,00 |
| 4 | Pejabat Eselon II | Unit/Tahun | Rp39.190.000,00 |

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

| NO | URAIAN | SATUAN | RODA EMPAT | DOUBLE GARDAN | RODA DUA |
|-----|--|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pemeliharaan kendaraan dinas operasional | Unit/Tahun | Rp34.100.000,00 | Rp36.930.000,00 | Rp3.850.000,00 |

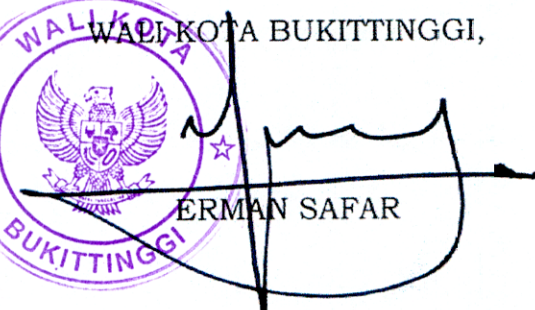
TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN
KANTOR, RODA 6 DAN *SPEED BOAT*

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|-------------------------------------|------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Operasional Dalam Lingkungan Kantor | Unit/Tahun | Rp9.750.000,00 |
| 2. | Roda 6 | Unit/Tahun | Rp37.110.000,00 |
| 3. | <i>Speed Boat</i> | Unit/Tahun | Rp20.240.000,00 |

Penggunaan bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan dinas operasional dirinci pada Tabel 2.11. Penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan diluar hari kerja disertai surat tugas. Penggunaan bahan bakar minyak tidak termasuk dalam hal melaksanakan perjalanan dinas luar kota.

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS JABATAN
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------|--|------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3.4. | Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas | | |
| 1 | BBM Operasional/Mobilitas Rutin Bulanan | | |
| | a. Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan PNS Tk. A di Daerah | | Sesuai Kebutuhan |
| | - Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah | | |
| | b. Pejabat Struktural | | |
| | - Eselon II.b | Liter/Hari | 8 |
| | - Eselon III.a | Liter/Hari | 5 |
| | - Eselon III.b / Penyetaraan Fungsional (Koordinator) | Liter/Hari | 4 |
| | - Eselon IV/ Penyetaraan Fungsional (Sub Koordinator) | Liter/Hari | 1,5 |
| | c. Bendahara, Pengurus Barang/Surat Berharga, Pengawas Pendidikan, Penilik Pendidikan, Caraka, Pengawas Bangunan, Pengawas Alat Berat dan PPTK Konstruksi serta Pejabat Fungsional Tertentu lainnya. | Liter/Hari | 1 |
| | | | |
| 2 | Operasional/Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan) | | |
| | Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas <i>Standby</i> | | |
| | a. Kendaraan Dinas Roda 4 | | |
| | - Kapasitas Silinder > 2001 cc | Liter/Hari | 4 |
| | - Kapasitas Silinder 1601 s/d 2000 cc | Liter/Hari | 3,5 |
| | - Kapasitas Silinder 1000 s/d 1600 cc | Liter/Hari | 3 |
| | b. Kendaraan Dinas Roda 2 | Liter/Hari | 1 |
| | c. Kendaraan Dinas Roda 2 Patwal (Dinas Perhubungan) | Liter/Hari | 1,5 |

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

1. BELANJA BARANG PAKAI HABIS

1.1 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. belanja makanan dan minuman merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
2. belanja makanan dan minuman rapat digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat, sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya. Belanja makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat disyaratkan melibatkan SKPD lain, instansi vertikal dan/atau masyarakat;
3. belanja makanan dan minuman lembur diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas diluar jam kerja normal dan/atau hari libur dengan ketentuan pelaksanaan lembur sekurang-kurangnya dua jam;
4. dalam hal telah diberikan uang makan lembur, maka makanan dan minuman lembur tidak dapat diberikan;
5. belanja makanan dan minuman untuk fasilitas pelayanan urusan pendidikan, kesehatan dan sosial, termasuk untuk aktivitas lapangan menggunakan besaran makanan minuman rapat.
6. untuk belanja makanan dan minuman tambahan mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan.

Besaran standar harga satuan khusus untuk Belanja makanan dan minuman tercantum pada table 3.1.

TABEL 3.1
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.14 | Belanja Makan dan Minum | | |
| a | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | |
| | - Makan | Porsi | Rp30.000 |
| | - Kudapan (Snack) | Porsi | Rp12.000 |
| | - Kudapan (Snack) dalam bentuk prasmanan | Porsi | Rp15.000 |
| | - Makan Reses DPRD | Porsi | Rp40.000 |
| | - Kudapan (Snack) Reses DPRD | Porsi | Rp17.000 |
| b | Belanja Makanan dan Minuman Lembur | | |
| | Makan | Porsi | Rp30.000 |
| | Kudapan (Snack) | Porsi | Rp15.000 |
| c | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | |
| 1) | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kepala Daerah | | |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|-----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | - Makan | Porsi | Rp110.000 |
| | - Kudapan (Snack) | Porsi | Rp49.000 |
| 2) | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Peringatan Hari Jadi Kota (Tamu Kepala Daerah dan/atau DPRD) pada sidang Paripurna DPRD | | |
| | Makan | Porsi | Rp110.000 |
| | Kudapan (Snack) | Porsi | Rp49.000 |
| 3) | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SKPD | | |
| | - Makan | Porsi | Rp30.000 |
| | - Kudapan (Snack) | Porsi | Rp12.000 |
| d | Belanja Makanan dan Minuman Tambahan | | |
| | - Pemberian makan tambahan Posyandu Balita / Lansia | Posyandu/ Kegiatan | Rp500.000 |

4. BELANJA JASA TENAGA (UPAH)

Belanja jasa tenaga (upah) meliputi:

- a) Jasa Tenaga Pendidikan;
- b) Jasa Tenaga Kesehatan;
- c) Jasa Tenaga Laboratorium;
- d) Jasa Tenaga Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum;
- e) Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- f) Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g) Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
- h) Jasa Tenaga Sumber Daya Air;
- i) Jasa Tenaga Perhubungan;
- j) Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan;
- k) Jasa Tenaga Administrasi;
- l) Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- m) Jasa Tenaga Kebersihan;
- n) Jasa Tenaga Keamanan;
- o) Jasa Tenaga Caraka;
- p) Jasa Tenaga Supir;
- q) Jasa Tenaga Juru Masak;
- r) Jasa Tenaga Mekanik Listrik;
- s) Jasa Tenaga Informasi Dan Teknologi;
- t) Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
- u) Jasa Penulis dan Penerjemahan;
- v) Jasa Pelaksana *fogging*; dan
- w) Jasa Penyelenggaraan Mayat Terlantar.

Jasa tenaga (Upah) terdiri dari gaji, tunjangan dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang diberikan jasa tenaga (upah) adalah pegawai kontrak harian dan/atau kontrak bulanan yang bekerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengelompokan jasa tenaga terdiri dari pegawai kontrak, pegawai kontrak harian, pegawai kontrak untuk pekerjaan beresiko tinggi, pegawai kontrak

yang mempunyai beban kerja lebih, pegawai kontrak profesional, pegawai kontrak tenaga anestesi, jasa ajudan, jasa *voorijder* serta Jasa Penulisan dan Penerjemahan.

Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko adalah pegawai kontrak yang dalam pekerjaannya mempunyai resiko fisik pada SKPD yaitu:

- a. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lainnya pada Dinas Kebakaran;
- c. Pegawai Kontrak yang bertugas dalam Operasional Pengelolaan Sampah dan Pemetong Rumput/Pohon pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Pariwisata;
- e. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Juru Sembelih pada UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian dan Pangan;
- h. Pegawai Kontrak Dokter Umum dan Penata Anestesi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi;
- i. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- j. Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Dinas Perhubungan.

Pegawai kontrak yang mempunyai beban kerja lebih adalah pegawai kontrak yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki beban kerja lebih pada SKPD yaitu:

- a. Pegawai kontrak pada Badan Keuangan; dan
- b. Pegawai kontrak pada Tata Usaha Wali Kota, Tata Usaha Wakil Wali Kota, Tata Usaha Sekretaris Daerah, Tata Usaha Asisten, Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota, Sopir Wali Kota, Sopir Wakil Wali Kota, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Rumah Dinas Wali Kota, Sopir Rumah Dinas Wakil Wali Kota dan Petugas serta Pembantu Rumah Dinas, Staf Protokol.

Khusus tunjangan/uang kesejahteraan pegawai kontrak diberikan kepada:

- a) Tunjangan guru non ASN pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan pegawai tidak tetap/kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) atau organisasi sejenisnya pada Wilayah Kota Bukittinggi; dan
- b) Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh

Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Ketentuan dalam pengelompokan Pegawai Kontrak, upah dan pemotongan atas jasa upah diatur dalam kontrak kerja. Pembayaran Gaji/Upah Pegawai Kontrak mempertimbangkan besaran Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Satuan belanja jasa/upah tenaga kerja terinci pada tabel 3.5.

TABEL 3.5
BELANJA JASA/UPAH TENAGA KERJA

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-------|--|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5. | BELANJA JASA/UPAH TENAGA KERJA | | |
| 3.5.1 | a. Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak | | |
| | 1. Pegawai Kontrak | OB | Rp2.500.000,00 |
| | 2. Pegawai Kontrak Harian | OH | Rp90.000,00 |
| | 3. Pegawai Kontrak untuk Pekerjaan Beresiko | OB | Rp3.000.000,00 |
| | 4. Pegawai Kontrak yang Mempunyai Beban Kerja Lebih | OB | Rp3.000.000,00 |
| | 5. Pegawai Kontrak Profesional | | |
| | – Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) | OB | Rp3.900.000,00 |
| | – Tenaga Programmer dan Perencana | OB | Rp5.000.000,00 |
| | 6. Pegawai Kontrak Penata Anestesi RSUD | OB | Rp4.000.000,00 |
| | 7. Pegawai Kontrak Dokter Hewan | OB | Rp5.000.000,00 |
| | b. Belanja Jasa Upah Kerja dan Insentif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | | |
| | 1. Upah Pegawai Kontrak Dokter Spesialis | OB | Rp5.000.000,00 |
| | 2. insentif Dokter Spesialis | OB | Rp15.000.000,00 |
| | 3. insentif Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Internship Non PNS | OB | Rp1.500.000,00 |
| | 4. insentif Apoteker Non PNS | OB | Rp1.250.000,00 |
| | 5. Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis | /Hari | Rp1.000.000,00 |
| | 6. Jasa Tenaga Kesehatan Referral Dr. Spesialis untuk pelayanan operasi emergency/cyto diluar jam kerja | | |
| | – Operasi Besar | / Kali | Rp500.000,00 |
| | – Operasi sedang dan kecil | / Kali | Rp300.000,00 |
| | c. Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | |
| | 1. Jasa Ajudan Walikota (Polisi) | OB | Rp2.900.000,00 |
| | 2. Jasa Voorijder Pengamanan (Polisi) | OH | Rp200.000,00 |
| | 3. Jasa Tenaga Pengamanan <i>Car Free Day</i> | OK | Rp30.000,00 |
| | d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Harian) | | |
| | 1. Kapasitas ruangan kecil (kapasitas sd 50 orang) | OK | Rp150.000,00 |
| | 2. Kapasitas ruangan sedang (kapasitas 51 sd 200 orang) | OK | Rp200.000,00 |
| | 3. Kapasitas ruangan besar (kapasitas lebih dari 200 orang) | OK | Rp300.000,00 |
| 3.5.2 | Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak | | |
| | Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur, diberikan kepada Guru Swasta dan | OB | Rp600.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-------|---|--------|----------------|
| | Negeri yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Bukittinggi. | | |
| | Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi | OT | Rp1.000.000,00 |
| 3.5.3 | Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Untuk Instansi Vertikal Yang Membantu/ Mendukung Program Pemerintah Daerah | | |
| | Belanja Jasa Kegiatan program Pemerintah Daerah yang bersifat Insidentil | | |
| | - Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota | | |
| | Penanggung Jawab | OH | Rp100.000,00 |
| | Koordinator | OH | Rp90.000,00 |
| | Petugas Pelaksana | OH | Rp80.000,00 |
| | - Petugas Pelaksana Kegiatan Tingkat Kecamatan | | |
| | Penanggung Jawab | OH | Rp50.000,00 |
| | Koordinator | OH | Rp40.000,00 |
| | Petugas Pelaksana | OH | Rp30.000,00 |
| 3.5.4 | Jasa Penulisan dan Penerjemahan | OK | Rp150.000,00 |
| 3.5.5 | Jasa Pelaksana <i>fogging</i> | OK | Rp120.000,00 |
| 3.5.6 | Jasa Penyelenggaraan Mayat Terlantar | OK | Rp1.000.000,00 |

5. BELANJA JASA TENAGA AHLI

Belanja jasa tenaga ahli digunakan untuk membiayai jasa yang diberikan oleh tenaga ahli.

Belanja jasa tenaga ahli meliputi:

- a) Jasa Tenaga Ahli Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b) Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi;
- c) Jasa Tenaga Ahli Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum;
- d) Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah;
- e) Jasa Tenaga Ahli Perawatan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan;
- f) Jasa Tenaga Ahli Analisa Laboratorium;
- g) Jasa Tenaga Ahli Jasa Visum;
- h) Jasa Tenaga Perawatan Masyarakat;
- i) Jasa Tenaga Ahli Penyelenggara Bangunan Gedung;
- j) Jasa Tenaga Psikolog/Konselor/Mediator/Terapis;
- k) Jasa Tenaga Pendampingan Psikolog Klinis Forensik;
- l) Jasa Tenaga Ahli Penyelenggara Bangunan Gedung;
- m) Jasa Tenaga Psikolog/Konselor/Mediator/Terapis;
- n) Jasa Tenaga Pendampingan Psikolog Klinis Forensik; dan
- o) Jasa Tenaga Ahli Autopsi Mayat;

Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan pada:

- a) ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b) pemenuhan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama dimaksud meliputi memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata serta Penyelesaian tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda pajak, retribusi dan piutang Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah adalah tenaga ahli yang dalam tugasnya memberikan pertimbangan, pendapatan, saran dan sejenisnya kepada Wali Kota terkait pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Tenaga ahli ini melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi formal dan informal yang dimiliki dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Wali Kota.

TABEL 3.6
BELANJA JASA TENAGA AHLI

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|--------|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.6 | Belanja Jasa Tenaga Ahli Pada Rumah Sakit Umum Daerah | | |
| | - Belanja Jasa Evaluasi Thermoluminisence Dosemeter (TLD) Radiologi | Orang/alat | Rp175.000,00 |
| | - Belanja Jasa tenaga Penata Anestesi tidak tetap | Pasien | Rp250.000,00 |
| 3.7 | Kuasa Hukum dari Kejaksaan Negeri | | |
| | - Kepala Kejaksaan Negeri | OB | Rp2.500.000,00 |
| | - Kasi Pada Kejaksaan Negeri | OB | Rp1.500.000,00 |
| | - Jaksa Pengacara Negara | OB | Rp1.000.000,00 |
| 3.8 | Belanja Jasa tenaga Pembuatan dan Perumusan Produk Hukum | | |
| 3.8.1 | Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademis | Orang/Produk | Rp5.000.000,00 |
| 3.8.2 | Jasa Tenaga Ahli Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah/Perwako | Orang/Produk | Rp1.000.000,00 |
| 3.9 | Jasa Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah | OB | Rp5.000.000,00 |
| 3.10 | Belanja Jasa Perawatan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan | Paket | Rp6.000.000,00 |
| 3.11 | Belanja Jasa tenaga Analisa Laboratorium | Paket | Rp500.000,00 |
| 3.12 | Belanja Jasa Visum | Kegiatan | Rp400.000,00 |
| 3.13 | Belanja Jasa Perawatan Masyarakat | Paket/Hari | Rp750.000,00 |
| 3.14 | Jasa Tenaga Ahli Penyelenggara Bangunan Gedung | | |
| 3.14.1 | Jasa Tenaga Ahli Bangunan Kepentingan Umum | OK | Rp1.200.000,00 |
| 3.14.2 | Jasa Tenaga Ahli Rumah Tidak Sederhana | Berkas | Rp200.000,00 |

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------|---|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.15 | Jasa tenaga Psikolog/Konselor/Mediator/Terapis | Orang | Rp300.000,00 |
| 3.16 | Jasa tenaga Pendampingan Psikolog Klinis Forensik | Kasus | Rp1.500.000,00 |
| 3.17 | Jasa Autopsi Mayat Terlantar | OK | Rp1.000.000,00 |

15. BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PRESTASI

Belanja hadiah yang bersifat prestasi digunakan untuk membiayai hadiah perlombaan, pertandingan dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh pihak lain. Satuan belanja hadiah yang bersifat prestasi terinci pada tabel 3.16.

TABEL 3.16
BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PRESTASI

| NO | URAIAN | SATUAN | SD/MI | SMP/ SEDERAJAT | SMA/ SEDERAJAT |
|--------|--|--------|-------------|--|-------------------|
| 3.24 | Belanja Hadiah Yang Bersifat Prestasi | | | | |
| 3.24.1 | Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik | | | | |
| | - Juara I | Org. | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 |
| | - Juara II | Org. | Rp900.000 | Rp1.300.000 | Rp1.800.000 |
| | - Juara III | Org. | Rp800.000 | Rp1.100.000 | Rp1.600.000 |
| | | | | | |
| | URAIAN | SATUAN | PROVINSI | NASIONAL | INTER NASIONAL |
| 3.24.2 | Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi | Org. | | | Rp5.000.000 |
| | - Juara I | Org. | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | |
| | - Juara II | Org. | Rp800.000 | Rp1.500.000 | |
| | - Juara III | Org. | Rp600.000 | Rp1.000.000 | |
| | Duo | Grup | | | Rp2.500.000 |
| | Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang | Grup | Rp3.000.000 | Rp5.000.000 | Rp10.000.000 |
| | | | | | |
| | URAIAN | SATUAN | KOTA | PROVINSI | NASIONAL |
| 3.24.3 | Penghargaan Untuk Guru Berprestasi | Org. | Rp5.000.000 | Rp7.500.000 | Rp10.000.000 |
| | | | | | |
| 3.24.4 | Penghargaan Atas Prestasi Siswa | | | | |
| | Pemenang Lomba Mewakili Kota Bukittinggi | Org. | | | Rp5.000.000 |
| | - Juara I | Org. | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | |
| | - Juara II | Org. | Rp800.000 | Rp1.500.000 | |
| | - Juara III | Org. | Rp600.000 | Rp1.000.000 | |
| | - Duo | Grup | | | Rp2.500.000 |
| | - Kelompok (grup) Jumlah personil minimal 3 orang | Grup | Rp3.000.000 | Rp5.000.000 | Rp10.000.000 |
| | | | | | |
| 3.24.5 | Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rupiah) | | | Realisasi Penerimaan 100% Wajib Pajak 65% | |
| | | | | September | November |
| | - 0 s/d 100.000.000 | | | Rp4.000.000 | Rp3.000.000 |
| | - 100.000.001 s/d 200.000.000 | | | Rp5.000.000 | Rp4.000.000 |
| | - 200.000.001 s/d 300.000.000 | | | Rp6.000.000 | Rp5.000.000 |
| | - 300.000.001 s/d 400.000.000 | | | Rp7.000.000 | Rp6.000.000 |
| | - Pencapaian target diatas 400.000.000 | | | Rp8.000.000 | Rp7.000.000 |
| | - Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Realisasi Penerimaan 100% seluruh Kelurahan | | | Rp4.000.000 | Rp3.000.000 |
| | | | | | |

| | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|---------|---|---------------|--------------|
| 3.24.6 | Prestasi atas lomba yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga | | |
| | - Juara I | PL | Rp10.000.000 |
| | - Juara II | PL | Rp8.000.000 |
| | - Juara III | PL | Rp7.000.000 |
| | - Harapan I | PL | Rp5.000.000 |
| | - Harapan II | PL | Rp4.000.000 |
| | - Harapan III | PL | Rp3.500.000 |
| | - Penghargaan kepada peserta yang dokumennya diserahkan kepada panitia | Peserta | Rp400.000 |
| | - Reward Kader yang Membawa Akseptor KB IUD Implant pada Pelayanan Serentak | Org/ Akseptor | Rp50.000 |
| | | | |
| | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
| 3.24.7 | Prestasi atas lomba yang diberikan kepada Sekolah Adiwiyata | | |
| | - Sekolah Adiwiyata tingkat Kota | Sekolah | Rp3.000.000 |
| | - Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi | Sekolah | Rp5.000.000 |
| | - Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional | Sekolah | Rp7.000.000 |
| | - Sekolah Adiwiyata tingkat Mandiri | Sekolah | Rp10.000.000 |
| | | | |
| | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
| 3.24.8 | Prestasi atas Lomba Mewakili Kota Bukittinggi MTQ tingkat Provinsi | | |
| | - Juara I | Orang | Rp35.000.000 |
| | - Juara II | Orang | Rp15.000.000 |
| | - Juara III | Orang | Rp10.000.000 |
| | - Harapan I | Orang | Rp5.000.000 |
| | - Harapan II | Orang | Rp4.000.000 |
| | - Harapan III | Orang | Rp3.000.000 |
| | | | |
| | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
| 3.24.9 | Prestasi atas pelaksanaan Proklim | | |
| | - Proklim Utama | kelompok | Rp10.000.000 |
| | - Proklim Lestari | kelompok | Rp15.000.000 |
| | | | |
| | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
| 3.24.10 | Prestasi atas Event Olahraga Nasional | | |
| | • Atlet-atlet yang lolos pada Babak Kualifikasi PON/Pra PON | orang | Rp5.000.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional //(individu/perorangan) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp25.000.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp15.000.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp10.000.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional //(grup/beregu) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp18.750.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp11.250.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp7.500.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional //(individu/perorangan) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp50.000.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp35.000.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp25.000.000 |

| | | | |
|--|---|-------|--------------|
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional // (grup/beregu) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp37.500.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp26.250.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp18.750.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Nasional // (individu/perorangan) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp35.000.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp25.000.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp15.000.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Nasional // (grup/beregu) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp26.250.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp18.750.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp11.250.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Pelajar Nasional // (individu/perorangan) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp25.000.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp15.000.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp10.000.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Paralympics Pelajar Nasional // (grup/beregu) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp18.750.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp11.250.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp7.500.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Special Olympics Nasional // (individu/perorangan) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp25.000.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp15.000.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp10.000.000 |
| | • Atlet-atlet yang meraih medali pada Pekan Special Olympics Nasional // (grup/beregu) | | |
| | - Medali Emas | orang | Rp18.750.000 |
| | - Medali Perak | orang | Rp11.250.000 |
| | - Medali Perunggu | orang | Rp7.500.000 |

21. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KHUSUS UNTUK PROVINSI BARU

21.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri khusus untuk provinsi baru terinci pada tabel 3.21.

TABEL 3.21
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT |
|----|------------------|--------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 1. | Papua Barat Daya | OH | Rp480.000 | Rp190.000 | Rp140.000 |
| 2. | Papua Tengah | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 3. | Papua Selatan | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |
| 4. | Papua Pegunungan | OH | Rp580.000 | Rp230.000 | Rp170.000 |

21.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri khusus untuk provinsi baru terinci pada tabel 3.22

TABEL 3.22

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | TARIF HOTEL | | | |
|----|------------------|--------|--|--|---|--|
| | | | KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD / FORKOPIMDA | ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/ ASN GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/ASN GOLONGAN III, II, dan I/PIHAK LAIN |
| 1. | Papua Barat Daya | OH | Rp3.872.000 | Rp3.212.000 | Rp2.056.000 | Rp718.000 |
| 2. | Papua Tengah | OH | Rp3.872.000 | Rp3.212.000 | Rp2.056.000 | Rp718.000 |
| 3. | Papua Selatan | OH | Rp3.872.000 | Rp3.212.000 | Rp2.056.000 | Rp718.000 |
| 4. | Papua Pegunungan | OH | Rp3.872.000 | Rp3.212.000 | Rp2.056.000 | Rp718.000 |

22. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR KHUSUS PROVINSI BARU

22.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor khusus provinsi baru terperinci pada tabel 3.23 dan tabel 3.24

TABEL 3.23

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULL DAY | FULL BOARD | RESIDENCE |
|----|------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1. | Papua Barat Daya | OP | Rp292.000 | Rp526.000 | Rp1.752.000 | Rp818.000 |
| 2. | Papua Tengah | OP | Rp318.000 | Rp536.000 | Rp1.863.000 | Rp854.000 |
| 3. | Papua Selatan | OP | Rp318.000 | Rp536.000 | Rp1.863.000 | Rp854.000 |
| 4. | Papua Pegunungan | OP | Rp318.000 | Rp536.000 | Rp1.863.000 | Rp854.000 |

TABEL 3.24

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

| NO | PROVINSI | SATUAN | HALFDAY | FULL DAY | FULL BOARD | RESIDENCE |
|----|------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1. | Papua Barat Daya | OP | Rp284.000 | Rp421.000 | Rp1.120.000 | Rp705.000 |
| 2. | Papua Tengah | OP | Rp293.000 | Rp478.000 | Rp990.000 | Rp771.000 |
| 3. | Papua Selatan | OP | Rp293.000 | Rp478.000 | Rp990.000 | Rp771.000 |
| 4. | Papua Pegunungan | OP | Rp293.000 | Rp478.000 | Rp990.000 | Rp771.000 |

22.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel 3.25.

TABEL 3.25
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR DI
DAERAH

| NO | PROVINSI | SATUAN | FULL BOARD | FULL DAY / HALFDAY DI DALAM KOTA | RESIDENCE DI DALAM KOTA |
|----|------------------|--------|--------------|--|----------------------------|
| 1. | Papua Barat Daya | OH | Rp160.000,00 | Rp115.000,00 | Rp160.000,00 |
| 2. | Papua Tengah | OH | Rp200.000,00 | Rp140.000,00 | Rp200.000,00 |
| 3. | Papua Selatan | OH | Rp200.000,00 | Rp140.000,00 | Rp200.000,00 |
| 4. | Papua Pegunungan | OH | Rp200.000,00 | Rp140.000,00 | Rp200.000,00 |

23. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KHUSUS
PROVINSI BARU

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri khusus provinsi baru
terinci pada tabel 3.26

TABEL 3.26
SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|----|------------------|--------------|--------------|
| 1. | Papua Barat Daya | Orang / Kali | Rp182.000,00 |
| 2. | Papua Tengah | Orang / Kali | Rp431.000,00 |
| 3. | Papua Selatan | Orang / Kali | Rp431.000,00 |
| 4. | Papua Pegunungan | Orang / Kali | Rp431.000,00 |

24. BELANJA SEWA KULKAS PENYIMPANAN MAYAT

Belanja sewa kulkas penyimpanan mayat digunakan untuk penangaran
mayat terlantar yang tidak mempunyai identitas atau keluarga. Besaran
biaya sudah termasuk biaya penyimpanan dan pengamanan mayat
selama dalam kulkas.

TABEL 3.27
BELANJA SEWA KULKAS PENYIMPANAN MAYAT

| NO | Uraian | SATUAN | BESARAN |
|----|---------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Belanja Sewa Kulkas Penyimpanan mayat | OH | Rp200.000,00 |

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 21 Tahun 2024

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 21 Tahun 2024

Tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

